

KINERJA INDUSTRI KAKAO DI INDONESIA

Indonesia's Cocoa Industry Performance

Ening Ariningsih*, Helena J. Purba, Julia F. Sinuraya, Sri Suharyono, Kartika Sari Septanti

*Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Jalan Tentara Pelajar No. 3B, Bogor 16111, Jawa Barat, Indonesia
Korespondensi penulis. E-mail: ening.ariningsih@gmail.com

Naskah diterima: 9 Juli 2019

Direvisi: 3 September 2019

Disetujui terbit: 16 Desember 2019

ABSTRACT

Indonesia is among the largest cocoa producing countries in the world. Various policies for cocoa production and quality improvement has been issued, but it still deals with some constraints. This paper reviews cocoa Indonesia's industry performance and its development strategy. Over the past decade, Indonesia's cocoa production kept declining due to decreased mature crop areas, unproductive crops enhancement, lower yield, and conversion of cocoa fields. Cocoa plantation is dominated by smallholders, limited capital, less knowledge, lack of technology access, and restricted market information. Government's role is crucial in facilitating efforts to increase productivity, quality, and markets access besides to developing its downstream industries. Developing cocoa industry is not only the responsibility of the Ministry of Agriculture but it involves other institutions, i.e., local governments, NGOs, businessmen, research institutions, and investors. It is expected to improve Indonesia's cocoa competitiveness in international market.

Keywords: *constraint, development strategy, policy, problem*

ABSTRAK

Indonesia termasuk negara produsen kakao terbesar di dunia. Pemerintah telah berupaya mengeluarkan berbagai kebijakan untuk peningkatan produksi dan mutu kakao, namun pengembangan kakao di Indonesia masih mengalami berbagai masalah. Tulisan ini menganalisis kinerja industri kakao serta strategi pengembangannya di Indonesia melalui penelaahan literatur. Selama dekade terakhir produksi kakao Indonesia terus menurun karena berkurangnya luas areal tanaman menghasilkan, meningkatnya tanaman tidak produktif, penurunan produktivitas, dan konversi lahan kakao. Perkebunan kakao didominasi perkebunan rakyat skala kecil, bermodal terbatas, serta akses terbatas terhadap teknologi dan informasi pasar. Peran pemerintah sangat penting dalam fasilitasi upaya peningkatan produktivitas, mutu, akses pasar, serta pengembangan industri hilirnya. Upaya pengembangan kakao bukan hanya tanggung jawab Kementerian Pertanian, tetapi bersifat lintas sektoral. Peran serta pemerintah daerah, LSM, pelaku bisnis, lembaga penelitian, dan investor sangat besar untuk mengembangkan dan membenahi agribisnis kakao di Indonesia sehingga daya saingnya meningkat di pasar internasional.

Kata kunci: *kebijakan, kendala, permasalahan, strategi pengembangan*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara produsen utama kakao (*Theobroma cacao* L.). Awalnya, Indonesia menempati urutan ketiga produsen kakao terbesar dunia setelah Pantai Gading dan Ghana (Karmawati et al. 2010). Namun, produksi kakao Indonesia yang terus menurun sejak tahun 2015 kemudian menyebabkan posisi Indonesia bergeser ke posisi terbesar kelima dunia, tergeser oleh Ekuador dan Nigeria pada tahun 2017 (IEI dan UNIED 2019). Walaupun demikian,

perdagangan kakao yang mampu mendatangkan devisa negara dan pendapatan masyarakat tetap menempatkan kakao sebagai salah satu komoditas penting dalam perekonomian Indonesia (Munarso 2016). Pada tahun 2017 nilai total ekspor kakao mencapai sebesar US\$1,12 miliar (BPS 2018). Kementerian Pertanian juga menetapkan kakao sebagai salah satu komoditas unggulan dalam pembangunan pertanian tahun 2015–2019 bersama karet, kelapa sawit, kelapa, kopi, lada, dan komoditas lainnya (Ditjenbun 2015). Target laju pertumbuhan produksi kakao ditetapkan 3,9% per tahun. Penetapan target ini

menunjukkan keinginan pemerintah untuk terus mendorong upaya peningkatan produksi kakao. Lebih lanjut, pemerintah telah menetapkan industri pengolahan kakao sebagai salah satu sektor yg diprioritaskan pengembangannya sesuai RIPIN tahun 2015–2035.

Kakao merupakan komoditas perkebunan yang memegang peranan penting sebagai sumber pendapatan masyarakat petani pekebun Indonesia. Diperkirakan tidak kurang dari 1,84 juta keluarga yang pendapatan utamanya tergantung pada komoditas kakao. Selain itu, lebih kurang 1 juta keluarga mengandalkan pendapatannya dari industri hilir kakao. Posisi tersebut menunjukkan bahwa peranan petani kakao dalam perekonomian nasional cukup signifikan (Ditjenbun 2014). Hal yang perlu mendapat perhatian, bahwa komposisi kepemilikan perkebunan kakao di Indonesia didominasi Perkebunan Rakyat (PR) dengan pangsa 97,8% dari total luas areal kakao di Indonesia (BPS 2018). Hal ini berarti keberhasilan industri kakao Indonesia dapat secara langsung memperbaiki kesejahteraan petani kakao.

Berdasarkan Kepmentan No. 511/2006 tentang Jenis Komoditas Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura serta Kepmentan No. 3599/2009 tentang Perubahan Lampiran I dari Kepmentan No. 511/2006, komoditas kakao merupakan satu di antara 16 komoditas perkebunan unggulan yang menjadi fokus pengembangan. Arah pengembangan komoditas-komoditas tersebut dicapai melalui program peningkatan produksi komoditas perkebunan berkelanjutan dengan implementasi kegiatan seperti rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi yang didukung oleh penyediaan benih bermutu, pemberdayaan pekebun dan penguatan kelembagaan, pembangunan dan pemeliharaan kebun sumber benih, penanganan pascapanen, pengolahan, fasilitasi pemasaran, standardisasi mutu, pembinaan usaha dan perlindungan perkebunan, serta pemberian pelayanan berkualitas di bidang manajemen dan kesekretariatan.

Program peningkatan produksi kakao yang dilaksanakan pemerintah tersebut masih belum berhasil dengan baik, yang ditunjukkan dari perkembangan produksi biji kakao yang terus menurun setelah tahun 2010 (BPS 2018). Selain itu, upaya pengembangan kakao juga dihadapkan pada berbagai masalah dan kendala, mulai dari hulu (budi daya) hingga ke hilir (pengolahan), bahkan hingga ke

perdagangannya. Tulisan ini merupakan hasil telaahan berbagai literatur yang bertujuan untuk menganalisis kinerja industri kakao di Indonesia, mulai dari hulu hingga ke hilir, serta perdagangan kakao.

PRODUKSI KAKAO DI INDONESIA

Selama sepuluh tahun terakhir (2008–2017), luas areal kakao secara total di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan, dari 1,43 juta ha pada tahun 2008 menjadi 1,69 juta ha pada tahun 2017. Akan tetapi, pertumbuhan total luas areal kakao yang meningkat tersebut tidak sejalan dengan perkembangan produksi biji kakao yang mengalami penurunan tajam selama periode yang sama, dari 804 ribu ton biji kakao kering pada tahun 2008 menjadi 657 ribu ton pada tahun 2017 (BPS 2018). Produksi biji kakao yang terus menurun tersebut menyebabkan posisi Indonesia di antara produsen kakao di dunia terus menurun. Data International Cocoa Organization (ICCO 2019) menunjukkan bahwa pada tahun 2018 Indonesia menempati urutan keenam produsen kakao dunia setelah Pantai Gading, Ghana, Ekuador, Nigeria, dan Kamerun.

Menurut status pengusahaannya, sebagian besar perkebunan kakao pada tahun 2017 diusahakan oleh perkebunan rakyat (PR) sebesar 1,7 juta ha (97,8%), sementara perkebunan besar swasta (PBS) mengusahakan 22,4 ribu ha (1,3%), dan perkebunan besar negara (PBN) hanya mengusahakan 14,7 ribu ha (0,9%). Diperkirakan sebesar 630,6 ribu ton biji kakao (95,9%) berasal dari perkebunan rakyat, 14,4 ribu ton (2,2%) dari perkebunan besar negara, dan 12,1 ribu ton (1,9%) berasal dari perkebunan besar swasta (BPS 2018). Tingginya persentase luas areal dan produksi biji kakao dari perkebunan rakyat menunjukkan peran penting kakao baik sebagai sumber lapangan kerja maupun pendapatan bagi petani (*smallholder*).

Luas areal perkebunan rakyat (PR) meningkat secara signifikan selama sepuluh tahun terakhir, dari 1,3 juta ha pada tahun 2008 menjadi 1,7 juta ha pada tahun 2017. Dalam periode yang sama, luas areal perkebunan besar negara (PBN) dan perkebunan besar swasta (PBS) menurun sangat tajam, masing-masing dari sebesar 50.584 ha dan 47.848 ha menjadi 14.747 ha dan 22.414 ha. Walaupun luas areal PR meningkat secara signifikan, produksinya juga menurun. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penurunan produksi kakao di Indonesia disebabkan penurunan produksi kakao pada semua status

pengusahaan. Dilihat dari pangsaanya, luas areal kakao PR meningkat dari 93,1% menjadi 97,8% selama periode yang sama, sementara PBN dan PBS menurun, yang menunjukkan makin pentingnya peranan kakao PR dalam produksi kakao nasional.

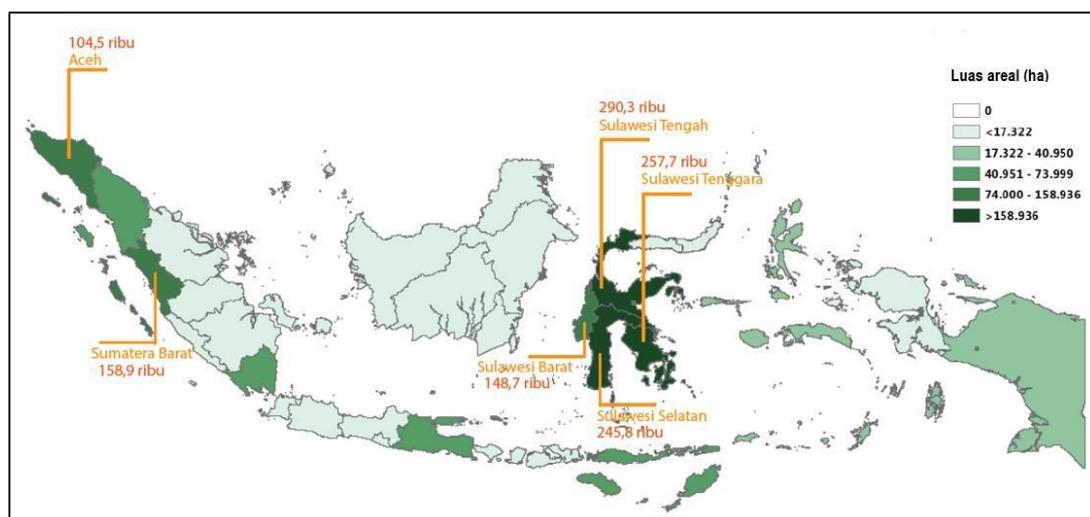
Jika ditelaah secara lebih rinci, data BPS (2018) menunjukkan bahwa penurunan produksi kakao PR disebabkan oleh menurunnya luas areal tanaman menghasilkan (TM), melonjaknya luas areal tanaman tua/rusak (TT/TR), dan menurunnya produktivitas kakao selama periode tersebut. Selama periode 2008–2017, luas areal tanaman kakao menghasilkan mencapai puncaknya pada tahun 2010 dengan 975 ribu ha, namun kemudian terus menurun hingga hanya seluas 785 ribu ha pada tahun 2017. Sementara itu, luas areal tanaman tua/rusak melonjak tajam, dari 162 ribu ha menjadi 514 ribu ha. Faktor lain yang berperan dalam penurunan produksi kakao adalah menurunnya produktivitas kakao.

Upaya peningkatan produksi kakao juga dihadapkan pada masalah konversi lahan kakao menjadi lahan komoditas lainnya, seperti kelapa sawit (Yusriadi 2015; Hanum 2018) dan tanaman pangan (Hastuty 2017). Faktor serangan hama dan penyakit serta pendapatan dari tanaman kakao yang rendah menjadi faktor penyebab paling dominan terjadinya konversi lahan kakao menjadi kelapa sawit. Hal ini disebabkan petani menganggap perkebunan kelapa sawit menghasilkan keuntungan lebih tinggi dan relatif tahan terhadap krisis dibanding perkebunan kakao. Hasil penelitian Hanum (2018) menunjukkan bahwa *present value*

pendapatan usaha tani kelapa sawit selama 25 tahun lebih besar daripada kakao, yaitu Rp90.477.202,42 pada sawit dan Rp44.629.869,87 pada kakao.

Konversi lahan kakao menjadi lahan tanaman pangan, terjadi seperti di Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Petani mengalihfungsikan lahan kakao menjadi lahan persawahan, didorong antara lain oleh faktor produksi (hasil produksi), faktor infrastruktur (potensi/ketersediaan irigasi), faktor ekonomi (kestabilan harga), dan faktor budi daya (serangan hama dan penyakit) (Hastuty 2017). Konversi lahan kakao menjadi lahan sawah terkait program Upsus Pajale terjadi di Kabupaten Paliwali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat (Kontan.co.id 2016). Dari sekitar 1.000 ha lahan yang dialihfungsikan menjadi areal sawah baru, sekitar 700 ha di antaranya berasal dari perkebunan kakao.

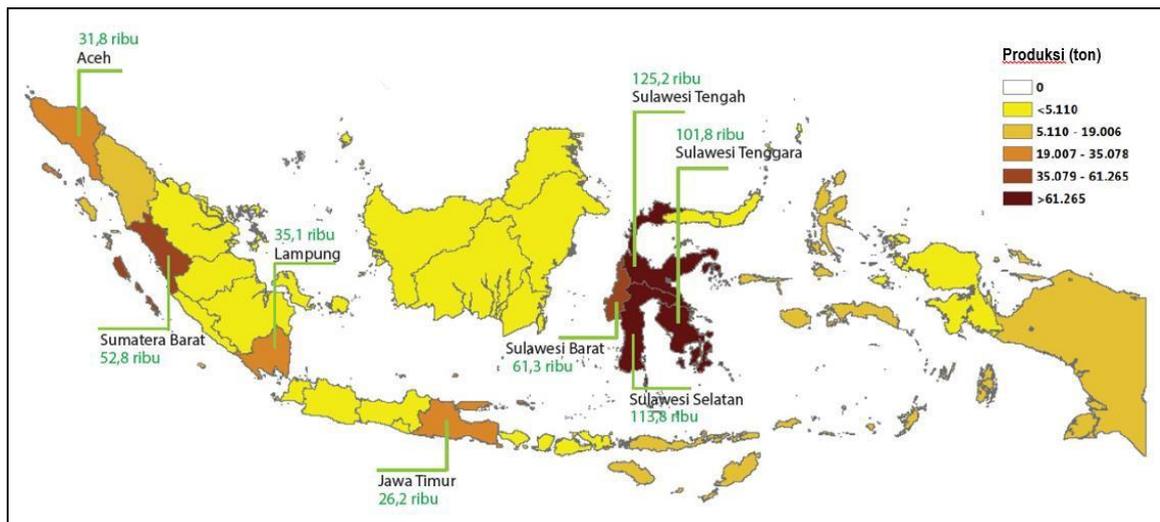
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS 2018), komoditas kakao ditanam di hampir seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta. Gambar 1 menunjukkan bahwa distribusi pertanaman kakao tidak merata antarprovinsi, melainkan terpusat di beberapa provinsi tertentu. Data sementara tahun 2017 menunjukkan terdapat tiga provinsi sentra pertanaman kakao terbesar di Indonesia, yaitu Provinsi Sulawesi Tengah (290,3 ribu ha), Sulawesi Tenggara (257,7 ribu ha), dan Sulawesi Selatan (245,8 ribu ha). Tiga provinsi lain yang memiliki luas areal perkebunan kakao tergolong tinggi adalah Provinsi Sumatera Barat (158,9 ribu ha), Sulawesi Barat (148,7 ribu ha),



Keterangan: *Angka sementara

Sumber: BPS (2018)

Gambar 1. Peta luas areal perkebunan kakao Indonesia, 2017*



Keterangan: *Angka sementara
Sumber: BPS (2018)

Gambar 2. Peta produksi biji kakao Indonesia, 2017*

dan Aceh (104,5 ribu ha). Selain keenam provinsi tersebut, provinsi-provinsi lainnya mempunyai luas areal perkebunan kakao kurang dari 100 ribu ha.

Sejalan dengan luas arealnya, produksi biji kakao di Indonesia juga didominasi oleh ketiga provinsi sentra pertanaman kakao, masing-masing dengan produksi sebesar 125,2 ribu ton (Sulawesi Tengah), 113,8 ribu ton (Sulawesi Selatan), dan 101,8 ribu ton (Sulawesi Tenggara). Pada Gambar 2 tampak bahwa Provinsi Sulawesi Barat juga mempunyai produksi biji kakao relatif tinggi, yaitu sebesar 61,3 ribu ton. Sentra produksi kakao di Pulau Sumatera terdapat di Provinsi Sumatera Barat, Lampung, dan Aceh, dengan produksi masing-masing sebesar 52,5 ribu; 35,1 ribu; dan 31,8 ribu ton biji kakao kering. Sementara itu, sentra produksi kakao di Pulau Jawa terdapat di Provinsi Jawa Timur dengan produksi sebesar 26,2 ribu ton.

BUDI DAYA KAKAO DI INDONESIA

Kinerja Budi Daya Kakao

Penanganan kakao pada tahap budi daya (*on farm*) turut menentukan produksi dan mutu biji kakao yang dihasilkan (Hartartri 2015). Penanganan proses produksi di kebun dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip cara budi daya yang baik dan benar akan menghasilkan biji (sebagai bahan mentah olahan) yang bermutu tinggi. Sebaliknya,

penanganan proses budi daya yang asal-asalan akan menghasilkan biji (sebagai bahan mentah olahan) yang bermutu rendah. Adanya bobot biji tidak seragam, infestasi hama atau penyakit dalam biji menyebabkan banyak biji yang tidak sesuai standar mutu akan tersortasi dan tidak bisa dikelompokkan dalam kualitas premium walaupun penanganan pascapanennya telah sesuai dengan acuan atau pedoman yang ada (Ditjenbun 2012a).

Dominannya perkebunan kakao rakyat di Indonesia berimplikasi pada timbulnya berbagai masalah dan kendala dalam pengembangan kakao di Indonesia, yang menyebabkan masih rendahnya tingkat produktivitas dan mutu kakao yang dihasilkan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar perkebunan kakao berupa perkebunan rakyat yang masih dikelola dengan cara tradisional sehingga optimalisasi pemanfaatan lahan sangat rendah (Wahyudi et al. 2009; Maharani et al. 2013; Hartartri 2015; Wonda dan Tomayahu 2016). Secara garis besar, masalah dan kendala yang dihadapi dalam pengembangan budi daya kakao dapat dikelompokkan sebagai berikut: (1) masih rendahnya SDM petani kakao; (2) terbatasnya modal dan akses terhadap permodalan; (3) tingginya harga input; (4) rendahnya penggunaan input berupa sarana produksi maupun teknologi budi daya; (5) tingginya intensitas serangan hama dan penyakit; (6) tanaman kakao berumur tua (>25 tahun); dan (7) terbatasnya akses terhadap peningkatan pengetahuan dan teknologi budi daya kakao (Tabel 1).

Tabel 1. Berbagai hasil studi terkait kinerja, masalah, dan kendala dalam pengembangan budi daya kakao

No.	Uraian	Peneliti
1.	Rendahnya SDM petani: - rendahnya pengetahuan dan keterampilan petani - rendahnya penguasaan manajemen usaha tani - rendahnya kompetensi petani	Maharani et al. (2013); Hartartri (2015); Managanta et al. (2019)
2.	Terbatasnya modal usaha dan akses petani terhadap pelayanan kredit	Maharani et al. (2013); Hartartri (2015)
3.	Tingginya harga beberapa input produksi	Maharani et al. (2013)
4.	Minimum dalam hal pemberian input produksi dan pengelolaan budi daya, terutama pemangkasan dan pengendalian hama dan penyakit tanaman	Wonda dan Tomayahu (2016)
5.	Petani umumnya masih menggunakan sumber benih lokal (asalan)	Wahyudi et al. (2009); Wonda dan Tomayahu (2016)
6.	Umur tanaman kakao sebagian besar sudah tua, di atas umur produktif tanaman kakao	Wahyudi et al. (2009)
7.	Tingginya tingkat dan intensitas serangan hama dan penyakit, terutama PBK	Herman et al. (2006); Wahyudi et al. (2009); Indriati et al. (2013)
8.	Kegiatan penyuluhan dan pelatihan masih sangat terbatas → akses terhadap peningkatan pengetahuan dan teknologi budi daya kakao masih sangat terbatas → kurangnya akses terhadap teknologi/inovasi pertanian	Maharani et al. (2013); Hartartri (2015); Managanta et al. (2019)

Sampai saat ini kakao masih dibudidayakan secara tradisional oleh petani setempat dengan penguasaan manajemen usaha tani yang rendah sehingga optimalisasi pemanfaatan lahan sangat rendah (Wahyudi et al. 2009; Maharani et al. 2013; Wonda dan Tomayahu 2016). Dalam kegiatan usaha tani kakao, petani umumnya masih menggunakan sumber benih lokal (asalan) yang rentan terhadap penyakit dan mempunyai produktivitas rendah, minimum dalam hal pemberian input produksi (terutama pupuk) dan pengelolaan budi daya, terutama pemangkasan, dan pengendalian hama dan penyakit tanaman. Padahal, ketiga aspek tersebut yang berperan penting dalam menentukan produktivitas tanaman dan mutu biji kakao.

Data sementara tahun 2017 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS 2018) menunjukkan bahwa produktivitas kakao di Indonesia sangat rendah dibanding potensi daya hasilnya. Secara rata-rata produktivitas kakao di Indonesia hanya sebesar 801 kg biji kakao per hektare, di mana produktivitas perkebunan rakyat (PR) (803 kg/ha) lebih rendah dari produktivitas tanaman kakao yang dikelola oleh perkebunan besar negara (PBN)

sebesar 848 kg/ha, dan produktivitas perkebunan besar swasta (PBS) jauh di bawahnya sebesar 684 kg/ha. Jika dibandingkan dengan potensi daya hasil klon-klon kakao unggul di Indonesia seperti disajikan pada Tabel 2 tampak jelas bahwa produktivitas kakao tersebut jauh di bawah potensi daya hasil yang bisa mencapai 1.800–3.670 kg/ha.

Menurut Wahyudi et al. (2009), rendahnya produktivitas komoditas kakao disebabkan umur tanaman kakao sebagian besar sudah tua, di atas 25 tahun, jauh di atas usia tanaman kakao paling produktif 13–19 tahun. Data tahun 2017 (BPS 2018) menunjukkan sebanyak 29,9% tanaman kakao di Indonesia masuk kategori tanaman rusak/tanaman tidak menghasilkan (TR/TTM). Minimnya modal menyebabkan petani membiarkan tanaman kakao yang sudah tua tidak diremajakan karena untuk meremajakan tanaman kakao diperlukan modal yang cukup besar. Faktor lain yang menyebabkan petani tidak meremajakan kakaonya adalah tidak tersedianya bibit kakao di dalam desa dan di desa sekitarnya, di samping petani tidak memiliki keterampilan teknis yang cukup untuk membuat sambung samping (Saptana et al. 2018).

Tabel 2. Klon-klon unggul kakao lindak di Indonesia

No.	Klon	Tahun dilepas	Potensi daya hasil (ton/ha/thn)	Ketahanan hama dan penyakit		
				Busuk buah	VSD	PBK
1.	ICCRI 03	2006	2,060	Tahan	Moderat	Moderat
2.	ICCRI 04	2006	2,090	Tahan	Rentan	Rentan
3.	ICCRI 07	2012	1,903	Tad	Moderat	Tahan
4.	Sulawesi 01	2008	1,800–2,500	Moderat	Tahan	Tad
5.	Sulawesi 02	2008	1,800–2,750	Tahan	Moderat	Tad
6.	Sulawesi 03	2012	1,837	Moderat	Moderat	Tahan
7.	RCC 70	2006	2,28	Agak tahan	Rentan	Rentan
8.	MCC 01	2014	3,67	Tahan	Tahan	Moderat
9.	MCC 02	2014	3,13	Tahan	Tahan	Tahan

Keterangan: VSD = *vascular streak dieback*; PBK = penggerek buah kakao; Tad = tidak ada data

Sumber: Puslitkoka (tanpa tahun)

Minimnya modal petani, selain menyebabkan petani membiarkan tanaman tuanya tidak diremajakan, menyebabkan kurang intensifnya perawatan tanaman kakao (pemupukan, pemangkasan, pengendalian OPT). Kondisi demikian menyebabkan rendahnya produktivitas kakao yang pada akhirnya menyebabkan rendahnya pendapatan petani kakao, sehingga menurut Maharani et al. (2013) dan Nurhadi et al. (2019), sampai saat ini usaha tani kakao belum mampu menjadi sumber pendapatan utama bagi keluarga tani. Menurut Saptana et al. (2018), kurangnya minat petani dalam pemeliharaan kakao pada awalnya sebagai akibat harga jual produknya yang rendah pascakrisis moneter dan ekonomi (1997/1998) dan pascakrisis pangan dan finansial global (2008/2009). Jatuhnya harga kakao di pasar global menyebabkan pemeliharaan tanaman kakao sangat kurang dan banyak tanaman kakao yang rusak. Menurut Managanta et al. (2019), harga biji kakao domestik bergerak mengikuti harga kakao dunia, walaupun arahnya tidak persis sama karena pengaruh nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika. Hal ini terjadi karena Indonesia sebagai *price taker* harga kakao.

Terbatasnya akses petani dalam hal informasi teknologi budi daya kakao menyebabkan rendahnya tingkat keterampilan teknis petani dalam budi daya kakao. Hartartri (2015) menunjukkan sekitar 40% petani di daerah penghasil kakao di Blitar belum memiliki akses terhadap peningkatan pengetahuan dan teknologi budi daya kakao maupun informasi pasar. Kegiatan penyuluhan dan pelatihan baik secara formal maupun informal oleh pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya, seperti

pelaku bisnis, lembaga swadaya masyarakat (LSM) masih sangat terbatas. Di samping itu, rendahnya tingkat pendidikan petani juga merupakan salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya keterampilan petani dalam budi daya dan pengolahan kakao. Menurut Managanta et al. (2019), petani kakao mempunyai tingkat kompetensi yang rendah karena lemahnya kekosmopolitan selain disebabkan oleh lemahnya peran penyuluh sebagai komunikator, advisor, dinamisator, motivator, organisator dan edukator. Penyuluhan kurang terlaksana dengan baik karena hampir tidak ada penyuluh yang fokus mendampingi petani kakao sehingga petani lebih banyak menyelesaikan masalah mereka sendiri tanpa arahan dan bantuan dari penyuluh. Usaha tani kakao yang dilakukan petani masih banyak mengutamakan pengalaman secara turun temurun dalam keluarga dan hasil interaksi dengan petani lainnya dalam lingkungan masyarakatnya.

Hama dan penyakit utama tanaman kakao yang menjadi masalah serius sampai saat ini adalah hama penggerek buah kakao (PBK) (*Conopomorpha cramerella* Snell), *Helopeltis antonii*, penyakit busuk buah kakao (BBK) (*Phytophthora palmivora*), dan penyakit *vascular streak dieback* (VSD) (*Oncibasidium theobromae*) (Ditjenbun 2016). Hama penggerek buah kakao (PBK) merupakan hama yang paling berbahaya dan sangat merugikan dan sulit dikendalikan pada budi daya kakao sehingga menjadi ancaman yang sangat serius bagi keberlanjutan perkebunan kakao (Herman et al. 2006; Ridwan 2013). Menurut Indriati et al. (2013), tingginya tingkat dan intensitas serangan PBK di lahan kebun petani disebabkan kebun milik petani rata-rata kurang

dipelihara dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan kurangnya pembersihan gulma di bawah tanaman kakao dan pemangkasan tanaman, serta tidak dilakukannya pemupukan yang memadai. Sementara, upaya pengendalian PBK yang dilakukan oleh petani dengan menggunakan insektisida kimia tidak efektif karena dilakukan pada buah yang sudah tua.

Kerugian akibat serangan PBK merupakan resultan dari penurunan berat biji, peningkatan persentase biji kualitas rendah, kehilangan hasil, dan meningkatnya biaya panen diakibatkan sulitnya memisahkan biji yang terserang dari kulit buahnya (Ridwan 2013). Kehilangan hasil tersebut terjadi akibat buah yang terserang PBK bijinya lengket dan kandungan lemaknya turun. Serangan pada buah muda mengakibatkan kehilangan hasil yang lebih besar karena buah akan mengalami masak dini sehingga buah tidak dapat dipanen. Herman et al. (2006) menunjukkan serangan PBK di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat menurunkan produktivitas antara 10 hingga 90% dengan rata-rata 50%. Besarnya penurunan produksi tersebut disebabkan oleh belum adanya kebersamaan petani dalam melakukan pengendalian hama PBK dan lambatnya proses adopsi pengendalian hama PBK.

Kebijakan Pengembangan Budi Daya Kakao

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kondisi perkebunan kakao rakyat, seperti pemberdayaan petani melalui Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) dan Sistem Kebersamaan Ekonomi (SKE), penerapan teknologi pengendalian dengan metode PSPsP (pemangkasan, sanitasi, panen sering, dan pemupukan) untuk pengendalian hama penggerak buah kakao (PBK) dan penyakit *vascular streak dieback* (VSD), serta penyediaan benih unggul. Mengingat pelaksanaannya masih parsial dalam skala kecil, maka hasilnya belum optimal. Oleh karena itu, pemerintah memandang kegiatan-kegiatan tersebut perlu dilakukan secara serentak, terpadu, dan menyeluruh melalui suatu gerakan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan maupun sumber daya yang ada (Ditjenbun 2012a).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, kemudian dicanangkan Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao (Gernas Kakao) pada tanggal 10 Agustus 2008 oleh Wakil Presiden RI di Mamuju, Sulawesi Barat, sebagai upaya percepatan peningkatan produktivitas dan mutu hasil kakao nasional melalui pemberdayaan secara optimal seluruh pemangku kepentingan

serta sumber daya yang tersedia. Dasar pelaksanaan Gernas Kakao yaitu Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 1643/2008 tentang Penyelenggaraan dan Pembentukan Tim Koordinasi Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao.

Gernas Kakao dilaksanakan pada tahun 2009 sampai 2013 meliputi target areal seluas 450.000 ha melalui peremajaan, rehabilitasi, intensifikasi, pemberdayaan petani, pengendalian hama dan penyakit, perbaikan mutu kakao, serta penyediaan sarana pendukung lainnya. Gerakan ini dilaksanakan mulai tahun 2009 di 9 provinsi meliputi 40 kabupaten, tahun 2010 di 13 provinsi mencakup 56 kabupaten, tahun 2011 di 25 provinsi meliputi 98 kabupaten, tahun 2012 di 14 provinsi mencakup 50 kabupaten, dan pada tahun 2013 di 5 provinsi meliputi 29 kabupaten. Pertanaman kakao di wilayah tersebut pada umumnya kondisi tanamannya sudah tua/rusak dan kurang terawat, terserang hama dan penyakit dengan tingkat serangan sedang sampai berat sehingga memerlukan upaya perbaikan secara menyeluruh agar produktivitas dan mutu dapat ditingkatkan (Ditjenbun 2012a).

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa permasalahan dalam implementasi Gernas Kakao, seperti ketidaksesuaian antara program dengan kebutuhan di lapangan. Pengadaan bibit yang dikatakan unggul dengan harga relatif mahal dilakukan melalui proyek pengadaan bibit unggul secara besar-besaran terkesan yang sangat dipaksakan dan tergesa-gesa karena pada saat awal implementasi pengadaan bibit *somatic embryogenesis* (SE) untuk kakao baru pertama kali diuji lapangan di Ekuador dalam jumlah yang relatif kecil. Tanaman kakao di lapangan yang berasal dari bibit tersebut mempunyai kinerja yang kurang baik karena batang tanaman menjulang tinggi tanpa ranting dan mudah rebah sehingga petani meninggalkan sistem penanaman dengan menggunakan bibit tersebut. Petani lebih cocok dengan sistem sambung samping (Nonci 2017). Selain masalah bibit, terdapat permasalahan dalam pengadaan pupuk formula khusus untuk daerah tertentu yang keberlanjutannya baik dalam bentuk program maupun secara bisnis tidak dapat dipertahankan. Selain itu, faktor penguatan motivasi petani dan transfer *knowledge* terkesan diabaikan.

Sejak tahun 2014 hingga saat ini Program Gernas Kakao sudah tidak ada lagi dan diganti dengan Program Pengembangan Komoditas Kakao Berkelanjutan. Program Gernas Kakao merupakan *crash program* yang dilatarbelakangi adanya masalah teknis, yang jika masalah

tersebut tidak diatasi maka akan terjadi penurunan luas areal, produksi, dan produktivitas kakao Indonesia. Kegiatan ini merupakan kegiatan *full package*, yakni petani diberikan bantuan benih hingga pendampingan. Program Gernas dirancang utuh dari hulu ke hilir hingga pascapanen dan pemasaran. Sementara, pada Program Pengembangan Komoditas Kakao Berkelanjutan paket bantuan yang diberikan tidak utuh, hanya berupa dukungan yang terdiri dari benih dan saprodi.

Pemerintah juga menerbitkan beberapa regulasi terkait pengembangan kakao. Permentan No. 50/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian yang diikuti terbitnya Kepmentan No. 46/2015 tentang Penetapan Kawasan Perkebunan Nasional telah menetapkan 18 kabupaten di 7 provinsi sebagai kawasan pengembangan kakao nasional TA 2015–2019, yaitu Kabupaten Pidie, Pidie Jaya (Provinsi Aceh); Pasaman, Pasaman Barat (Provinsi Sumatera Barat); Donggala, Parigi Moutong, Sigi (Provinsi Sulawesi Tengah); Luwu, Luwu Utara (Provinsi Sulawesi Selatan); Poliwali Mandar, Mamuju (Provinsi Sulawesi Barat); Konawe, Kolaka, Konawe Selatan, Kolaka Utara, Kolaka Timur (Provinsi Sulawesi Tenggara); Sikka, dan Ende (Provinsi Nusa Tenggara Timur). Permentan No. 50/2012 kemudian direvisi menjadi Permentan No. 56/2016 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian disertai perubahan Kepmentan No. 46/2015 menjadi Kepmentan No. 830/2016 tentang Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional.

Permentan No. 56/2016 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian kemudian direvisi menjadi Permentan No. 18/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani. Dalam Permentan tersebut yang dimaksud dengan 'kawasan pertanian berbasis korporasi petani' adalah kawasan pertanian yang dikembangkan dengan strategi memberdayakan dan mengkorporasikan petani. Dengan permentan tersebut, harus memasukkan prinsip-prinsip korporasi dalam pengembangan kawasan pertanian. Permentan tersebut diterbitkan sebagai upaya untuk menggerakkan kelembagaan usaha tani yang selama ini lebih berorientasi sebagai wadah pembinaan teknis budi daya ke arah yang lebih berorientasi pada agribisnis yang dapat bekerja sama saling memperkuat, saling membesarkan, dan saling menguntungkan. Dalam Permentan No. 18/2018 disebutkan bahwa korporasi petani adalah kelembagaan ekonomi petani berbadan hukum berbentuk koperasi atau badan hukum lain dengan sebagian besar kepemilikan modal

dimiliki oleh petani, sementara Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani adalah Kawasan Pertanian yang dikembangkan dengan strategi memberdayakan dan mengkorporasikan petani.

Berdasarkan Permentan No. 18/2018 kemudian diterbitkan Kepmentan No. 472/2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional. Berdasarkan Kepmentan tersebut, lokasi kawasan perkebunan kakao ditetapkan di 19 provinsi (Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, DI Yogyakarta, Banten, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua Barat, Papua, dan Kalimantan Tengah) dengan meliputi 62 kabupaten yang tersebar di ke-19 provinsi tersebut. Proyek percontohan pengembangan kakao berbasis korporasi dilakukan di Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara. Terkait dengan hal ini, di Kolaka Timur sudah terbentuk 22 Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) Sejahtera yang merupakan wadah petani untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat tani.

Selain itu, untuk penerapan teknik budi daya kakao yang baik dan memperhatikan keamanan pangan, lingkungan, kesehatan, dan mutu, Pemerintah juga menerbitkan Permentan No. 48/2014 tentang Pedoman Teknis Budi daya Kakao yang Baik (*Good Agriculture Practices/GAP on Cocoa*). Konsepsi Pedoman Budi daya Kakao yang baik mengacu pada konsepsi pertanian berkelanjutan (*sustainable agriculture*), yaitu pengelolaan sumber daya yang berhasil untuk usaha pertanian dalam memenuhi kebutuhan manusia yang terus berubah dan sekaligus mempertahankan atau meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikan sumber daya alam.

Strategi Pengembangan Budi Daya Kakao

Walaupun mempunyai beberapa kelemahan, program Gernas Kakao tetap dinilai sebagai salah satu program yang dapat meningkatkan produksi kakao. Gernas memiliki urgensi untuk dianggarkan kembali mengingat perkebunan kakao sekitar 97,8% merupakan perkebunan rakyat. Sangat kurangnya pasokan biji kakao lokal dan tingginya impor biji kakao menyebabkan Asosiasi Industri Kakao Indonesia (AIKI) mendorong pemerintah untuk kembali menganggarkan program Gernas Kakao agar produksi biji kakao bisa ditingkatkan sehingga dapat menekan impor biji kakao (Pratama 2018).

Beberapa saran perbaikan dalam pelaksanaan program Gernas Kakao di antaranya adalah pemerintah pusat harus lebih mengutamakan penyediaan bibit-bibit unggul daerah yang dapat dibudidayakan oleh petani ataupun pemda setempat. Program yang semula berorientasi proyek pengadaan barang seperti bibit dan pupuk secara terpusat, seyogianya diubah dalam bentuk pemberdayaan petani dan penguatan kelembagaan petani. Pemerintah pusat harus mendorong pemerintah daerah untuk memobilisasi tenaga-tenaga penyuluh mereka untuk meningkatkan interaksi dengan petani melalui peningkatan kapasitas SDM penyuluh, penyediaan anggaran, serta membangun sistem koordinasi yang efektif. Melalui peningkatan interaksi diharapkan akan terjadi transfer pengetahuan dari penyuluh lapangan kepada petani. Program pengadaan pupuk khusus yang tidak berkelanjutan supaya dievaluasi dan diganti dengan penguatan petani untuk menghasilkan pupuk organik dan anorganik sesuai paket rekomendasi yang bermanfaat bagi mereka. Upaya untuk meningkatkan lemahnya kompetensi petani membutuhkan perbaikan tingkat kekosmopolitan dan peran penyuluh sebagai komunikator, advisor, dinamisator, motivator, organisator, dan edukator.

Demikian pula, pemerintah perlu meningkatkan produktivitas dan mutu kakao perkebunan rakyat yang tidak terlibat dalam program Gernas Kakao agar usaha tani kakao tetap menarik untuk diusahakan dan memberikan keuntungan yang layak bagi petani, disertai dukungan akses permodalan dan penguatan kelembagaan petani. Jika kebijakan ini tidak dilakukan, dikhawatirkan petani kakao terus beralih ke komoditas lain yang lebih menguntungkan sehingga pada akhirnya dapat menyebabkan ketersediaan bahan baku biji kakao untuk industri pengolahan dalam negeri menjadi berkurang dan harapan Indonesia untuk menjadi produsen kakao terbesar dunia tidak tercapai.

Hal yang terpenting, harus terbangun sinergi antara petani, pemerintah daerah, pusat, universitas, serta lembaga riset guna bersama-sama mendorong peningkatan produksi kakao di wilayah tersebut. Kelembagaan petani harus kuat dan terus berinovasi untuk meningkatkan keterampilan teknis petani. Penguatan kelembagaan petani adalah kunci pembangunan pertanian yang berkelanjutan berbasis korporasi. Petani tidak hanya memproduksi, tapi juga mampu menciptakan

produk akhir, serta mengolah dan memasarkan sendiri (Idris 2018).

PASCAPANEN KAKAO

Kinerja Pascapanen Kakao

Penanganan pascapanen kakao yang baik dan benar akan menghasilkan biji yang memiliki mutu tinggi. Dalam pascapanen kakao terdapat tiga kegiatan yang sangat penting dalam menentukan kualitas kakao, yaitu fermentasi, pengeringan, dan sortasi. Menurut Hartartri (2015), fermentasi menjadi faktor penentu mutu biji kakao, terutama kualitas cita rasa. Melalui proses fermentasi yang baik dan benar dapat diperoleh aroma coklat yang baik. Lebih lanjut, Munarso et al. (2016a) menjelaskan bahwa fermentasi biji kakao dapat memperbaiki karakter aroma khas kakao, warna biji, mengurangi rasa pahit, asam, manis, dan mengeringkan kulit biji seperti tempurung.

Berbagai hasil kajian menunjukkan bahwa pada umumnya petani kakao tidak melakukan proses fermentasi biji kakao atau tidak melakukan fermentasi biji kakao secara sempurna (Davit et al. 2013; Listyati et al. 2014; Hartartri 2015; Manalu 2018). Pada umumnya, petani kakao di Indonesia menjual langsung biji kakao dalam bentuk basah atau kering. Jika dalam bentuk basah, biji kakao langsung dijual begitu selesai dikeluarkan dari buahnya. Hal ini umumnya dilakukan petani karena kekurangan tenaga kerja. Jika dalam bentuk kering, petani menjemurnya terlebih dulu tanpa melalui proses fermentasi. Secara nasional, kakao fermentasi di Indonesia hanya antara 10–20% (Muhajir 2018).

Penjualan biji kakao tanpa melalui proses fermentasi dilakukan karena pada umumnya petani terdesak kebutuhan untuk segera mendapatkan uang tunai (Manalu 2018). Kesulitan pembiayaan usaha tani dan kebutuhan uang tunai untuk keperluan hidup selama masa menunggu sebelum penjualan hasil panen menyebabkan banyak petani terjebak dengan praktek sistem ijon atau utang kepada para tengkulak. Hal ini ditengarai menjadi penyebab para petani menjual hasil perkebunan tanpa fermentasi untuk memperoleh uang secara cepat karena jika biji kakao difermentasi terlebih dahulu harus menunggu waktu 4–6 hari lebih lama. Para petani juga enggan melakukan fermentasi karena tanpa melalui fermentasi pun biji kakao tetap laku dijual (Manalu 2018).

Faktor utama yang menyebabkan petani enggan melakukan fermentasi biji kakao adalah tidak terdapat perbedaan harga yang signifikan antara biji kakao fermentasi dan nonfermentasi sehingga tidak muncul insentif harga akibat proses fermentasi (Munarso 2016). Perbedaan harga antara harga biji kakao fermentasi dan nonfermentasi hanya terpaut sekitar Rp2.000 hingga Rp2.500 per kg biji kakao (Davit et al. 2013; Kontan.co.id 2016). Adanya insentif yang memadai terbukti mampu mendorong petani untuk melakukan proses fermentasi dan bahkan memelihara kebun kakao dengan lebih baik seperti yang terjadi di kalangan anggota Koperasi Kerta Semaya Samaniya di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Perbedaan harga Rp13.000 hingga Rp16.000 per kilogram biji kakao kering mampu mendorong petani untuk melakukan fermentasi dan melakukan praktik budi daya kakao yang baik (Muhajir 2018).

Ditinjau dari aspek pengeringan biji kakao, pada umumnya petani melakukan pengeringan biji kakao secara alami dengan menjemur biji di bawah sinar matahari. Penjemuran biji kakao umumnya dilakukan di atas lantai semen atau dengan menggunakan alas plastik atau terpal (Hartartri 2015), padahal semestinya pengeringan dilakukan menggunakan para-para. Pelaksanaan pengeringan pada umumnya hanya dilakukan selama 2–3 hari sehingga kandungan kadar air biji kakao masih relatif tinggi, sekitar 10–15%. Dampak pelaksanaan

pengeringan ini menyebabkan harga biji kakao yang diterima petani masih rendah. Sesuai dengan SNI kakao (SNI 2323:2008/Amd 1:2010), kadar air biji kakao kering maksimum 7,5%. Kondisi tersebut dapat dicapai dengan lama pengeringan selama 4-5 hari dalam kondisi matahari bersinar terik.

Menurut Manalu (2018), pada umumnya para petani juga tidak melakukan penyortiran, baik sebelum pemecahan biji kakao maupun setelah pengeringan yang bertujuan untuk memisahkan kotoran atau kontaminan. Biji kakao tersebut langsung dikemas dan dijual ke pedagang pengumpul (pembeli) sehingga harga yang ditentukan oleh pembeli jauh di bawah harga pasar. Menurut Hartartri (2015), pemasaran biji kakao tanpa fermentasi, berkadar air tinggi, dan tanpa sortasi tersebut umumnya selain dipengaruhi oleh terbatasnya informasi mengenai mutu biji kakao yang diinginkan oleh konsumen, juga dipengaruhi oleh adanya kebutuhan keluarga petani yang memerlukan perputaran uang secara cepat. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya akses petani terhadap pelayanan kredit, baik di lembaga keuangan, bank komersial, maupun lembaga kredit lainnya, seperti koperasi dan kelompok tani.

Berdasarkan penelusuran literatur tersebut, masalah dan kendala yang dihadapi dalam pascapanen kakao terbagi atas tiga kegiatan utama, yaitu (1) pada umumnya petani tidak

Tabel 3. Berbagai hasil studi terkait kinerja, masalah, dan kendala dalam pascapanen kakao

No.	Uraian	Peneliti
1.	Pada umumnya petani tidak melakukan proses fermentasi biji kakao atau tidak melakukan fermentasi biji kakao secara sempurna, bahkan sebagian petani menjual dalam bentuk biji kakao basah karena: <ul style="list-style-type: none"> - terdesak kebutuhan untuk segera mendapatkan uang tunai - waktu fermentasi yang relatif lama (4–6 hari) - kekurangan tenaga kerja - terjebak dalam sistem ijon atau utang kepada para tengkulak - tidak terdapat insentif harga yang memadai antara biji kakao fermentasi dan nonfermentasi - selalu ada pasar untuk biji kakao nonfermentasi 	Davit et al. (2013); Listyati et al. (2014); Hartartri (2015); Abubakar et al. (2016); Manalu (2018),
2.	Kadar air biji kakao yang dijual petani masih relatif tinggi karena waktu pengeringan kurang lama	Hartartri (2015)
3.	Pada umumnya petani tidak melakukan sortasi biji kakao	Hartartri (2015); Manalu (2018)

melakukan proses fermentasi biji kakao atau tidak melakukan fermentasi biji kakao secara sempurna, bahkan sebagian petani menjual dalam bentuk biji kakao basah; (2) kadar air yang masih relatif tinggi karena waktu pengeringan kurang lama; dan (3) pada umumnya petani tidak melakukan sortasi biji kakao (Tabel 3).

Kebijakan Pengembangan Pascapanen Kakao

Seiring dengan tuntutan pasar yang makin memperhatikan mutu, pemerintah melalui Badan Standardisasi Nasional (BSN) membuat standar mutu biji kakao Indonesia yang diatur dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) Biji Kakao (SNI 2323:2008/Amd 1:2010). Ketentuan standar SNI ini meliputi definisi, klasifikasi, syarat mutu, cara pengambilan contoh, cara uji, syarat penandaan (*labelling*), cara pengemasan, dan rekomendasi. Standar mutu ditentukan sebagai tolok ukur untuk pengawasan pengendalian mutu. Setiap bagian biji kakao yang akan diekspor harus memenuhi persyaratan standar mutu tersebut yang diawasi oleh lembaga pengawasan terkait yang ditunjuk (Manalu 2018). Standar mutu terbagi atas dua syarat mutu, yaitu syarat umum dan syarat khusus (Tabel 4 dan 5). Syarat umum biji kakao yang tertera di dalam SNI ditentukan atas dasar ukuran biji, tingkat kekeringan, dan tingkat kontaminasi benda asing; sedangkan syarat

khusus mutu biji kakao meliputi kadar biji berjamur, kadar biji *slaty*, kadar biji berserangga, kadar kotoran, dan kadar biji berkecambah. Salah satu prasyarat menjaga mutu biji kakao yang ditetapkan dalam SNI tersebut adalah fermentasi.

Ketentuan SNI biji kakao tersebut telah ditindaklanjuti dengan Permentan No. 51/2012 tentang Pedoman Penanganan Pascapanen Kakao (*Good Handling Practices on Cocoa*). Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan mutu biji kakao dan mampu mengangkat kakao nasional agar dapat bersaing baik di pasar domestik maupun global serta berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk menghasilkan biji kakao yang berkualitas dan memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi, tidak hanya tergantung pada varietas dan lingkungan pertumbuhan tanaman kakao saja, tetapi yang terutama adalah bagaimana para petani kakao melakukan kegiatan pascapanen dan mengolah biji kakao tersebut untuk menjaga mutu yang lebih baik. Salah satu faktor yang sangat menentukan mutu biji kakao adalah difermentasi atau tidaknya biji kakao tersebut. Namun, ketentuan dan kebijakan tersebut belum berjalan dengan baik karena walaupun diwajibkan, tetapi tidak ada sanksi yang diberlakukan bila ketentuan tersebut dilanggar oleh pelaku yang bersangkutan (Manalu 2018).

Tabel 4. Persyaratan umum biji kakao menurut SNI 2323:2008/Amd 1:2010

No.	Jenis uji	Satuan	Persyaratan
1.	Serangga hidup	-	Tidak ada
2.	Serangga mati	-	Tidak ada
3.	Kadar air (b/b)	%	Maks 7,5
4.	Biji berbau asap dan/atau <i>hammy</i> dan/atau berbau asing	-	Tidak ada
5.	Kadar biji pecah dan/atau pecah kulit (b/b)	%	Maks 2
6.	Kadar benda-benda asing (b/b)	%	Tidak ada

Sumber: SNI 2323:2008/Amd 1:2010

Tabel 5. Persyaratan khusus mutu biji kakao menurut SNI 2323:2008/Amd 1:2010

Jenis mutu		Persyaratan				
Kakao mulia (<i>Fine cocoa</i>)	Kakao lindak (<i>Bulk cocoa</i>)	Kadar biji berjamur (b/b)	Kadar biji <i>slaty</i> (b/b)	Kadar biji berserangga (b/b)	Kadar kotoran (b/b)	Kadar biji berkecambah (b/b)
I-F (AA-SS)	I-B (AA-SS)	Maks 2	Maks 3	Maks 1	Maks 1,5	Maks 2
II-F (AA-SS)	II-B (AA-SS)	Maks 4	Maks 8	Maks 2	Maks 2	Maks 3
III-F (AA-SS)	III-B (AA-SS)	Maks 4	Maks 20	Maks 2	Maks 3	Maks 3

Sumber: SNI 2323:2008/Amd 1:2010

Melalui Permentan No. 67/2014 tentang Persyaratan Mutu dan Pemasaran Biji Kakao, Kementan mewajibkan petani melakukan proses fermentasi biji kakao sebelum sampai ke industri olahan atau eksportir. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Permentan No. 67/2014, peraturan ini bertujuan untuk (a) meningkatkan daya saing dan nilai tambah biji kakao Indonesia, (b) mendukung pengembangan industri berbahan baku kakao dalam negeri, (c) memberikan perlindungan pada konsumen dari peredaran biji kakao yang tidak memenuhi persyaratan mutu, (d) meningkatkan pendapatan petani kakao, dan (e) mempermudah penelusuran kembali kemungkinan terjadinya penyimpangan produksi dan peredaran.

Permentan No. 67/2014 yang disahkan Menteri Pertanian Suswono pada 12 Mei 2014 ini mencakup kelembagaan petani, persyaratan mutu dan penanganan, pemasaran, serta pembinaan dan pengawasan. Permentan tersebut menyebutkan bahwa peningkatan kualitas kakao bisa dilakukan melalui Unit Fermentasi dan Pemasaran Biji Kakao (UFP-BK). Lembaga ini bisa dibentuk di tingkat kelompok tani atau gabungan kelompok tani (gapoktan). Dalam aturan tersebut, biji kakao yang berasal dari produksi dalam negeri harus memenuhi persyaratan mutu, di antaranya dengan adanya Surat Keterangan Asal Lokasi Biji Kakao (SKAL-BK) yang diterbitkan oleh UFP-BK.

Diundangkan 21 Mei 2014, aturan ini mulai berlaku 24 bulan dihitung sejak tanggal diundangkan. Artinya, peraturan seharusnya berlaku pada 21 Mei 2016. Namun, setelah mendengar masukan dari berbagai pihak, terutama pelaku usaha (Askindo), Kementan menunda pemberlakuan wajib fermentasi kakao hingga tahun 2019. Alasan penundaan tersebut adalah ketidaksiapan pelaksanaan peraturan di lapangan, baik dari segi komponen dan kelembagaan di mana baik pemerintah maupun petani dinilai sama-sama belum siap melaksanakan wajib fermentasi kakao. Sebagai contoh, pemerintah belum menyiapkan tenaga pengawasan di lapangan, sedangkan petani belum membentuk kelompok tani. Selain itu, tidak ada ketentuan bagi industri olahan kakao untuk menyerap kakao fermentasi petani serta tidak ada harga patokan kakao fermentasi dari pemerintah sehingga berpotensi merugikan petani. Pada saat itu, harga kakao cenderung turun menjadi Rp25.000/kg. Harga biji kakao fermentasi hanya terpaut sedikit lebih tinggi dibanding harga biji kakao nonfermentasi, yaitu sekitar Rp2.000/kg. Akibatnya, petani menjadi

tidak berminat melakukan fermentasi (Kontan.co.id 2016).

Strategi Pengembangan Pascapanen Kakao

Menurut Munarso (2016), insentif harga yang tidak muncul akibat proses fermentasi menyebabkan petani enggan melakukan fermentasi sehingga target peningkatan mutu kakao melalui pengurangan kadar biji yang tidak difermentasi sulit diraih. Kondisi ini menimbulkan beberapa gagasan, antara lain membentuk kelembagaan fermentasi dan proses pascapanen lainnya pada tingkat kelompok tani atau gabungan kelompok tani. Kelembagaan ini juga menyediakan dana talangan bagi petani sehingga pemerintah harus memfasilitasi kelembagaan tersebut dengan dukungan akses terhadap permodalan. Kelembagaan ini diharapkan tidak hanya mengorganisasi proses fermentasi bersama sehingga meningkatkan mutu kakao, tetapi juga sebagai sarana untuk memperoleh insentif harga biji kakao yang difermentasi yaitu dengan memperpendek rantai pemasaran agar petani mendapatkan harga kakao secara maksimal. Selain itu, petani perlu diberikan penyuluhan, pelatihan, dan fasilitasi pengadaan alat fermentasi sederhana yang dapat dikerjakan oleh kelompok petani yang melibatkan generasi muda petani.

Untuk mengatasi waktu fermentasi yang relatif lama (6–7 hari), teknologi fermentasi dengan waktu yang singkat telah tersedia. Teknologi fermentasi ini didasarkan pada prinsip pengurangan kadar pulp biji kakao sebelum fermentasi sehingga jumlah material yang diuraikan oleh mikroba fermentatif lebih sedikit sehingga waktu fermentasi menjadi lebih singkat (Prastowo et al. 2012). Percepatan waktu fermentasi juga dapat dilakukan melalui kombinasi antara proses *depulping* dengan pemberian bakteri asam laktat (*Acetobacter acetii* dan *Lactobacillus plantarum*) yang mampu mempersingkat proses fermentasi menjadi hanya 4–5 hari (Munarso et al. 2016b).

PEMASARAN KAKAO

Kinerja Pemasaran Kakao

Saluran pemasaran kakao melibatkan beberapa lembaga pemasaran sehingga rantai pemasaran kakao cukup panjang, mulai dari hulu hingga hilir. Pada umumnya di suatu lokasi terdapat beberapa saluran pemasaran biji kakao, yang jumlahnya bervariasi antarlokasi,

bisa dua (Saptana et al. 2018: Desa Bakti, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan) hingga empat saluran pemasaran (Baihaqi et al. 2014: Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Abubakar et al. 2016: di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah). Kajian Hartartri (2015) menunjukkan rantai pemasaran yang relatif panjang disebabkan masih terbatasnya akses petani terhadap informasi pasar.

Rantai pemasaran biji kakao relatif panjang dan kompleks terjadi karena melibatkan banyak pelaku bisnis. Biji kakao di Indonesia umumnya berpindah tangan setidaknya tiga sampai empat kali sebelum diterima oleh konsumen. Pelaku tata niaga yang terlibat bervariasi antarlokasi, namun berbagai kajian menunjukkan bahwa pelaku tata niaga yang umum adalah pedagang pengumpul keliling/desa, pedagang pengumpul kecamatan, pedagang besar kabupaten/provinsi, eksportir, dan industri pengolahan. Keterlibatan koperasi, baik primer maupun sekunder dalam tata niaga kakao terdapat di beberapa lokasi, seperti di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Baihaqi et al. 2014) dan di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali (Muhajir 2018). Keterlibatan kelompok tani/gapoktan terdapat di beberapa lokasi, seperti di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan (Saptana et al. 2018) dan di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur (Hartartri 2015). Untuk kakao fermentasi, pelaku tata niaga juga melibatkan Unit Pengolahan Hasil (UPH) kakao, seperti yang terjadi di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali (Muhajir 2018).

Nurhidayah (2014) mengemukakan bahwa posisi tawar petani cenderung rendah karena jumlah petani sangat banyak dan tersebar di berbagai wilayah, belum adanya koordinasi dan kerja sama antarpetani, persaingan pasar yang

makin kompetitif, lokasi konsumen akhir biji kakao yang jauh dari sentra produksi (di luar negeri), dan belum adanya rantai distribusi yang jelas dari petani sampai ke industri berbahan baku biji kakao, ditambah lagi dengan masalah produksi dan mutu kakao. Perilaku harga cenderung didominasi oleh kepentingan pedagang besar dan eksportir. Hasil kajian Abubakar et al. (2016) menunjukkan bahwa pasar biji kakao bersifat oligopsoni, posisi petani sebagai penerima harga, dan adanya hambatan masuk pasar karena peranan pedagang pengumpul. Lebih lanjut, menurut Hartartri (2015) dan Manalu (2018), rendahnya mutu biji kakao dan volume pemasaran biji kakao menyebabkan rendahnya posisi tawar petani dalam penentuan harga biji kakao. Harga yang ditentukan oleh pembeli jauh di bawah harga pasar karena dalam kondisi yang demikian dominasi pembeli sangat kuat dan sebaliknya posisi tawar petani sangat lemah.

Harga biji umumnya ditentukan secara sepihak oleh pengumpul berdasarkan mutu fisik biji, yaitu kadar air, ukuran biji, jumlah biji berjamur, dan kebersihan biji kakao. Pada umumnya, pembeli kakao adalah tengkulak yang kurang memperhatikan mutu. Di sisi lain, tengkulak juga memilih cara mudah, seperti tidak apa kualitas kurang baik asal cepat mendapatkan uang. Hal ini berdampak di tingkat lebih tinggi, bahkan di tingkat nasional. Sebagian pengumpul tingkat desa memberikan fasilitas kredit kepada petani dengan harapan pedagang akan mendapatkan lebih banyak biji kakao dari petani tersebut.

Berdasarkan kajian Abubakar et al. (2016), di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, pedagang pengumpul desa tidak melakukan pengolahan sehingga biji kakao yang dibeli dari petani hanya disimpan sebelum dijual kembali pada lembaga pemasaran

Tabel 6. Berbagai hasil studi terkait kinerja, masalah, dan kendala dalam pemasaran kakao

No.	Uraian	Peneliti
1.	Rantai pemasaran panjang dan kompleks	Baihaqi et al. (2014); Hartartri (2015); Manalu (2018)
2.	Posisi tawar petani rendah	Nurhidayah (2014); Hartartri (2015); Abubakar et al. (2016); Manalu (2018)
3.	Keterlibatan koperasi dan kelompok tani/gapoktan dalam pemasaran	Hartartri (2015); Muhajir (2018); Saptana et al. (2018)

berikutnya. Sementara itu, pedagang pengumpul tetap membeli biji kakao dengan harga yang bervariasi tergantung mutu dengan tingkat kekeringan dan kebersihan kakao yang dijual oleh petani. Selanjutnya, pedagang besar juga membeli biji kakao dari pedagang pengumpul walaupun dengan mutu rendah, namun harus melakukan sortasi dan pengeringan terlebih dahulu sebelum biji kakao diekspor dengan mengacu SNI untuk biji kakao. Namun, beragamnya mutu biji kakao yang dihasilkan petani Indonesia menyebabkan penerapan standarisasi sulit untuk dilakukan sehingga di pasar tujuan ekspor kakao Indonesia menghadapi penahanan otomatis (*automatic detention*) dan potongan harga (*automatic discount*).

Kebijakan dalam Pemasaran Kakao

Kebijakan pemerintah dalam pemasaran kakao sejalan dengan kebijakan pascapanen kakao, yaitu mewajibkan biji kakao yang dipasarkan merupakan biji kakao fermentasi. Sesuai Permentan 67/2014, dalam memasarkan/mengedarkan biji kakao harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1) biji kakao yang diedarkan/dipasarkan oleh UFP-BK wajib menyertakan SKAL-BK; 2) bagi industri pengolahan/eksportir dilarang menerima biji kakao yang tidak dilengkapi SKAL-BK; 3) dalam mengedarkan biji kakao, UFP-BK dapat menjalin kerja sama kemitraan usaha dengan industri pengolahan dan eksportir dituangkan dalam kontrak/kerja sama perjanjian yang saling menguntungkan, menggunakan mekanisme sistem resi gudang atau menggunakan mekanisme pasar lelang. Seiring dengan ditundanya permentan tersebut maka ketentuan-ketentuan tersebut juga ditunda pelaksanaannya.

Strategi Pengembangan Pemasaran Kakao

Strategi untuk mengatasi panjangnya rantai tata niaga dan masih terbatasnya peran kelompok tani dan petani kakao dalam mengendalikan rantai pasok dapat dilakukan dengan upaya melibatkan kelompok tani/gapoktan dan petani dalam mengendalikan atau berperan secara lebih besar pada rantai pasok. Dengan demikian, petani tidak hanya berperan sebagai produsen semata, namun dapat lebih berperan dalam mengendalikan rantai pasok. Untuk itu, petani/kelompok tani harus mampu membangun kelembagaan korporasi petani yang kuat guna meningkatkan

posisi tawar petani dan redistribusi sebagian profit yang selama ini dinikmati oleh *middlemen* kepada produsen. Bentuk kelembagaan korporasi yang dibangun bisa berupa koperasi, badan usaha milik desa (Bumdes), ataupun lembaga ekonomi masyarakat (LEM).

Pola tata niaga kakao pada umumnya masih memperdagangkan produk berupa biji kakao kering. Kelembagaan petani dapat menggantikan peran pengepul dan pedagang besar untuk menjual biji kakao langsung kepada industri pengolahan dalam bentuk biji kakao kering, baik hasil fermentasi maupun nonfermentasi, melalui kerja sama/kemitraan dengan perjanjian tertulis secara kontraktual. Dalam jangka menengah, kelembagaan petani diharapkan dapat pula mengolah biji kakao kering menjadi produk antara seperti pasta atau *powder*, atau produk akhir sehingga nilai tambah produk kakao dapat dinikmati oleh petani. Walaupun demikian, pengembangan agroindustri skala UMKM tersebut harus didukung dengan adanya program pengembangan keterampilan teknis dan kapabilitas manajerial karena dalam pengelolaan suatu agribisnis, pola manajemen yang baik akan sangat menentukan keberlanjutan agribisnis yang dibangun oleh petani/kelompok tani.

Sebagai contoh seperti yang dilaporkan Hartartri (2015) mengenai Gapoktan Guyub Santoso di Kabupaten Blitar yang memiliki unit usaha pembelian biji kakao. Selain membeli langsung dari petani, Gapoktan Guyub Santoso juga membeli biji kakao dari pengumpul. Unit usaha pembelian biji kakao gapoktan tersebut telah melakukan pembelian kakao hampir di seluruh wilayah kabupaten di Jawa Timur, bahkan sampai di wilayah Kabupaten Gunung Kidul, DI Yogyakarta. Gapoktan Guyub Santoso selanjutnya menjual biji kakao hasil pembeliannya tersebut kepada perusahaan pengolahan kakao, seperti PT Bumi Tangerang dan juga kepada eksportir lokal dan multinasional. Selain memasarkan biji kakao kering, Gapoktan Guyub Santoso juga memproduksi produk akhir, seperti permen, kue kering, dan es krim coklat. Produk-produk akhir tersebut dipasarkan di gerai Gapoktan Guyub Santoso yang bernama Kampung Coklat. Gapoktan Guyub Santoso mampu meningkatkan nilai tambah atas produk yang dihasilkan sehingga keuntungan yang diperoleh dari pemasaran permen coklat, kue, dan produk hilir lainnya relatif tinggi.

PENGOLAHAN KAKAO

Kinerja Pengolahan Kakao

Permani et al. (2011) dan Maulana dan Kartiasih (2017) menunjukkan bahwa industri hilir kakao belum berkembang dengan baik di Indonesia. Hal ini terjadi karena hingga tahun 2010-an biji kakao Indonesia lebih banyak diekspor (sekitar 80%) daripada diolah di dalam negeri sehingga industri pengolahan kakao domestik mengalami kekurangan bahan baku. Salah satu upaya pemerintah dalam peningkatan hilirisasi kakao adalah dengan pengenaan bea keluar biji atas ekspor kakao dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 67/2010 sehingga biji kakao lebih banyak diolah di dalam negeri. Dengan adanya aturan tersebut, kinerja industri pengolahan kakao domestik terus meningkat, namun kemudian kembali terbentur kendala kekurangan bahan baku. Hal ini menyebabkan dari kapasitas terpasang sebesar 800 ribu ton hanya terpakai sekitar separuhnya, yakni 466 ribu ton (2017) (Setiawan 2018). Dengan produksi kakao domestik yang terus menurun maka kebutuhan bahan baku kakao yang tidak dapat dipenuhi oleh dalam negeri ditutupi dengan cara mengimpor. Produk kakao olahan Indonesia diekspor dalam bentuk produk antara (*intermediate products*), yaitu *cocoa butter*, *cocoa liquor*, *cocoa cake*, dan *cocoa powder* (Pratama 2018).

Berbeda halnya dengan Malaysia. Malaysia banyak mengimpor biji kakao dari Indonesia. Biji kakao tersebut kemudian diolah dan diekspor ke berbagai negara dalam bentuk olahan, baik berupa produk antara maupun produk akhir. Berkembangnya industri pengolahan kakao di Malaysia mengakibatkan ekspor kakao olahan dari Malaysia dapat mengungguli ekspor kakao olahan Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa Malaysia dapat memperoleh nilai tambah yang besar dari hasil industri hilir kakao meskipun hanya memproduksi sedikit biji kakao, sedangkan Indonesia yang merupakan negara terbesar kelima penghasil biji kakao di dunia hanya menikmati sedikit nilai tambah dari hasil menjual kakao dalam bentuk biji dan produk antara.

Sebagai implikasi dari diberlakukannya kebijakan bea keluar (BK) untuk biji kakao pada tahun 2010, permintaan biji kakao sebagai bahan baku industri dalam negeri terus mengalami peningkatan. Konsumsi kakao Indonesia pada tahun 2017 mencapai sebesar 476 ribu metrik ton (IEI dan UNIED 2019).

Namun, produksi biji kering kakao dalam negeri terus menurun sehingga terjadi *excess demand* atau permintaan biji kakao dalam negeri yang lebih besar daripada penawarannya. Pasokan biji kakao lokal yang sangat kurang mendorong industri pengolahan mengimpor biji kakao. Kebutuhan industri sesuai kapasitas terpasang 800 ribu ton, sementara produksi biji kakao lokal hanya 260 ribu ton (Pratama 2018). Namun, menurut Rusman Heriawan (Merdeka.com 2014), bahan baku bukan satu-satunya penentu berkembang-tidaknya industri hilir. Di luar bahan baku ada lembaga keuangan (perbankan), ketersediaan infrastruktur pendukung, ekonomi biaya tinggi akibat berbagai pungutan, beban pajak yang memberatkan, dan berbagai insentif yang tidak mendukung.

Kebijakan Pengolahan Kakao

Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang kurang mendukung upaya pengembangan industri hilir kakao dalam negeri sehingga industri hilir kakao nasional kurang berkembang, antara lain adanya kebijakan pengenaan pajak produk primer dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Komoditas Primer. Pengenaan PPN sebesar 10% mengakibatkan biji kakao yang tadinya diolah di dalam negeri beralih menjadi diekspor dalam bentuk biji. Hal ini menyebabkan beberapa perusahaan pengolahan biji kakao tidak dapat beroperasi karena tidak memperoleh bahan baku yang cukup (Kementerian Perindustrian 2011). Dalam rangka menumbuhkan kembali industri pengolahan kakao, pada tahun 2007 pemerintah mencabut kebijakan pengenaan PPN melalui Peraturan Pemerintah No. 7/2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Namun, kebijakan ini belum serta merta menghidupkan industri yang sudah terlanjur tidak beroperasi.

Pemerintah menetapkan pemberlakuan bea keluar (BK) kakao dengan tingkat progresif antara 0–15% dengan melihat patokan harga referensi biji kakao dunia mulai 1 April 2010 melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 67/2010 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menghambat ekspor biji kakao mentah, meningkatkan nilai tambah produk pertanian

primer, serta menjamin ketersediaan bahan baku biji kakao bagi industri pengolahan kakao dalam negeri dan meningkatkan daya saing industri pengolahan kakao dalam negeri. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong industri pengolahan kakao dan mendorong petani untuk melakukan fermentasi biji kakao. Pemberlakuan BK kakao diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah sebanyak mungkin di dalam negeri.

Sesudah pemberlakuan kebijakan Tarif Bea Keluar, bermunculan pelaku agroindustri kakao baru di Indonesia, selain mendorong sejumlah investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Begitu juga dengan ekspansi di industri hilir, ikut terdorong dengan berkembangnya industri kakao. Akan tetapi, meskipun dampak pengenaan BK terhadap ekspor kakao cukup efektif, kebijakan ini ternyata belum mampu mendorong industri pengolahan kakao untuk beroperasi secara penuh (Syadullah 2012). Berdasarkan data Asosiasi Industri Kakao Indonesia (AIKI), industri kakao Indonesia yang sempat berjumlah hingga 30 perusahaan, pada tahun 2017 menjadi hanya 20 perusahaan dengan total kapasitas terpasang 800.000 ton/tahun, namun kapasitas terpakai baru sekitar 50% (Mandala 2017).

Kendala pengadaan bahan baku menyebabkan pabrik-pabrik pengolahan kakao berhenti beroperasi. Meskipun untuk ekspor biji kakao telah dikenakan bea keluar, namun industri pengolahan kakao masih mengalami kekurangan dalam pemenuhan bahan baku. Selain itu, penghentian produksi olahan kakao juga ditengarai karena pengenaan pajak pertambahan nilai sebesar 10% yang dikenakan pada produk-produk pertanian. Di sisi impor, pemerintah menetapkan peraturan yang menyebutkan bahwa setiap impor biji kakao kena bea masuk sebesar 5%, PPN 10% dan PPh 2,5%.

Strategi Pengembangan Industri Pengolahan Kakao

Menurut Zulfiandri et al. (2017), salah satu strategi hilirisasi yang dikembangkan oleh pemerintah adalah mengembangkan industri kakao berkapasitas kecil untuk melakukan pengolahan biji kakao. Pemerintah ingin mengintegrasikan sektor budi daya (*on farm*) dengan sektor pengolahan (*off farm*) agar pengembangan lebih terpadu dan pembinaannya menjadi lebih mudah. Upaya ini merupakan bentuk dan integrasi vertikal usaha kakao. Salah satu alasan pengembangan

dengan pendekatan vertikal adalah agar harga yang diterima oleh petani lebih tinggi. Adanya integrasi vertikal antara rantai penghasil bahan baku dengan konsumen atau pasar dapat meningkatkan harga yang diterima petani (Fischer dan Qaim 2012) dan meningkatkan posisi tawar petani (Trebbin 2014). Dengan integrasi vertikal harga dapat ditetapkan pada produk akhir sehingga dapat meningkatkan daya saing produk (Haynes et al. 2012). Dengan demikian, petani dapat menikmati peningkatan nilai tambah produk kakao dan berdampak peningkatan kesejahteraan petani.

Pemerintah perlu mengevaluasi kembali pelaksanaan kebijakan bea ekspor kakao dengan tujuan untuk mengembangkan industri pengolahan dalam negeri karena berdampak negatif terhadap penerimaan petani akibat terjadinya penurunan harga di tingkat petani. Kebijakan alternatif untuk pengembangan industri hilir kakao yang disarankan adalah pemberian insentif fiskal dan moneter kepada pelaku industri seperti pengurangan pajak dan subsidi suku bunga pinjaman serta perbaikan iklim usaha seperti perbaikan infrastruktur, kemudahan perizinan, serta alat dan mesin pengering. Untuk menjamin ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan, disarankan kebijakan pembatasan ekspor biji kakao, namun tetap memberikan harga yang kompetitif bagi petani (Permani et al. 2011).

PERDAGANGAN KAKAO

Kinerja Perdagangan Kakao

Sampai tahun 2010 sebesar 80% ekspor kakao Indonesia masih dalam bentuk bahan mentah berupa biji kakao (Suryana et al. 2014). Menurut Ditjenbun (2012b), umumnya mutu biji kakao yang diekspor masih rendah karena tidak difermentasi, kandungan kadar air masih tinggi, ukuran biji tidak seragam, kadar kulit tinggi, keasaman tinggi, cita rasa sangat beragam, dan tidak konsisten. Selain itu, terdapat biji kakao yang terserang serangga hama, terserang jamur, dan tercampur dengan kotoran atau benda-benda asing lainnya. Faktor yang menyebabkan beragamnya mutu kakao yang dihasilkan, selain karena penanganan dari tingkat kebun (*on farm*), juga karena penanganan pascapanen, serta pengawasan mutu yang belum optimal. Sementara menurut Rubiyo dan Siswanto (2012), rendahnya mutu biji kakao Indonesia disebabkan oleh biji kakao yang belum difermentasi, minimnya sarana

pengolahan, dan lemahnya pengawasan mutu, serta penerapan teknologi pada seluruh tahapan pengolahan biji kakao.

Ekspor biji kakao yang lebih besar daripada kakao olahan menunjukkan bahwa Indonesia telah banyak kehilangan potensi nilai tambah dan penerimaan devisa negara dari hasil industri pengolahan kakao. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan harga yang jauh antara biji kakao dengan kakao olahan. Selain itu, umumnya biji kakao Indonesia bermutu rendah (terkontaminasi jamur, serangga, dan kadar kotoran tinggi) sehingga dengan harga biji kakao yang sudah rendah masih juga dikenakan pemotongan harga (Hasibuan et al. 2012). Di negara tujuan ekspor, terutama di Amerika Serikat, kakao Indonesia diberlakukan penahanan otomatis (*automatic detention*) dan potongan harga (*automatic discount*) sehingga kakao Indonesia mempunyai daya saing lebih rendah dibanding kakao yang dihasilkan negara lain (Ditjenbun 2012a).

Kebijakan Perdagangan Kakao

Pada tanggal 25 Februari 2014 telah diterbitkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 70P/2013. Putusan tersebut mengabulkan permohonan uji materiil dari pemohon, yaitu Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN). Isi putusan tersebut memerintahkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk mencabut Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No. 31/2007 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah No. 12/2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebeaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Implikasi dari Putusan Mahkamah Agung tersebut di antaranya adalah barang hasil pertanian yang merupakan hasil perkebunan, termasuk kakao, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah No. 31/2007 yang semula dibebaskan dari pengenaan PPN berubah menjadi dikenakan PPN sehingga atas penyerahan dan impornya dikenai PPN dengan tarif 10%, sedangkan atas ekspornya dikenai PPN dengan tarif 0% (perincian jenis barang terlampir). Selain itu, pengusaha (orang pribadi maupun badan usaha) yang melakukan penyerahan barang hasil pertanian tersebut wajib memungut PPN dan untuk itu wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, kecuali pengusaha yang termasuk pengusaha kecil dengan omzet sampai dengan Rp4,8 miliar

per tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 197/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 68/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.

Pengenaan PPN 10% tersebut dapat merugikan petani kecil. Mayoritas petani kakao, seperti juga petani kopi, teh, dan kelapa sawit, merupakan petani skala kecil dengan pemilikan lahan kurang dari satu hektare. Kecilnya luas lahan yang dimiliki menyebabkan biji kakao yang dihasilkan petani dijual ke pedagang pengumpul (pemasok) sehingga melalui rantai pasok yang relatif panjang sebelum akhirnya diolah. Hal tersebut menyebabkan pedagang pengumpul (pemasok) menekan harga beli biji kakao petani. Selain itu, pengenaan PPN barang hasil pertanian berpotensi menjadi disintensif bagi peningkatan hilirisasi produk pertanian, termasuk industri pengolahan kakao. Hal ini karena pajak untuk ekspor dibebaskan, sedangkan jika dijual kepada pengolah di dalam negeri, terkena PPN 10%. Dengan kondisi tersebut, pengusaha yang dibebani PPN lebih memilih mengekspor dalam bentuk bahan baku.

Untuk mendorong agar ekspor kakao dalam jenis selain biji kakao lebih banyak, melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 67 tahun 2010 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, Pemerintah telah menerapkan bea keluar (BK) ekspor kakao (berlaku 1 April 2010). Dengan peraturan tersebut ekspor biji kakao dikenakan BK dengan tingkat progresif antara 0–15% dengan melihat patokan harga referensi biji kakao dunia. Untuk harga referensi sampai dengan US\$2.000 tidak dikenakan tarif BK (0%), harga referensi US\$2.000–2.750 ditetapkan tarif BK sebesar 5%, harga referensi US\$2.750–3500 ditetapkan tarif BK sebesar 10%, dan harga referensi lebih dari US\$3.500 ditetapkan tarif sebesar 15%.

Jenis produk ekspor kakao Indonesia mengalami pergeseran dari biji kakao menjadi produk lemak/minyak kakao dan pasta kakao akibat kebijakan bea keluar (BK) dari pemerintah di tahun 2010. Pangsa ekspor biji kakao dari sebelumnya sebesar 72,44% (2010) menjadi hanya sebesar 4,78% (2017). *Compound annual growth rate* (CAGR) 2013–2017 produk ekspor biji kakao Indonesia menurun sebesar -33,7%, sedangkan lemak/minyak kakao dan pasta kakao meningkat masing-masing sebesar 7,2% dan 4,1%.

Sejak adanya Bea Keluar (BK) biji kakao di tahun 2010, kinerja industri pengolahan kakao

domestik terus meningkat. Namun dengan produksi kakao domestik yang terus menurun maka kebutuhan bahan baku kakao yang tidak dapat dipenuhi oleh dalam negeri ditutupi dengan cara mengimpor sehingga impor biji kakao makin meningkat. CAGR nilai impor kakao Indonesia pada tahun 2013–2017 meningkat cukup tinggi sebesar 11,4%. Di sisi lain, Permani et al. (2011) menyebutkan bahwa penerapan pajak ekspor kakao berpengaruh menyebabkan kerugian yang sangat signifikan kepada petani. Penerapan bea ekspor hanya menguntungkan industri, sedangkan petani yang merupakan komponen terbesar dari sistem agribisnis kakao justru mengalami kerugian karena bea ekspor tersebut pada akhirnya dibebankan kepada petani.

Strategi Pengembangan Perdagangan Kakao

Menurut Munarso (2016), tujuan pasar tampaknya menjadi kunci penerapan SNI maupun Permentan No. 67/2014. Sejauh ini terdapat dua pasar utama biji kakao dengan orientasi yang berbeda. Pasar Eropa mempunyai preferensi biji kakao terfermentasi lebih kuat dibanding pasar Amerika yang justru banyak meminta biji kakao nonfermentasi. Amerika Serikat tidak membutuhkan biji kakao fermentasi karena produk yang ingin dihasilkan adalah lemak kakao untuk bahan baku kosmetik dan obat-obatan yang membutuhkan kandungan polifenol yang tinggi. Polifenol berfungsi sebagai antioksidan, antiradikal, antimikrobal, antiproliferasi, antimutagenik, dan antikarsinogenik. Kandungan polifenol akan menurun jika biji kakao difermentasi. Eropa membutuhkan biji kakao fermentasi karena kebutuhan bahan baku untuk produk pangan yang membutuhkan cita rasa yang baik. Cita rasa kakao akan muncul jika dilakukan proses fermentasi.

Kakao Indonesia dikenal sebagai *bulk cocoa* yang digunakan untuk memproduksi lemak dan sebagai campuran coklat. Kakao Indonesia memiliki karakteristik khusus yang tidak dimiliki negara lain, yaitu rasa *fruity* dengan *melting point* yang tinggi. Karakteristik tersebut menjadikan kakao Indonesia cocok digunakan untuk bahan pencampur (*blending*), terlebih untuk industri pengolahan campuran kakao nonfermentasi di bawah 20% tidak akan merubah cita rasa kakao.

Data ekspor tahun 2017 menunjukkan bahwa pasar tujuan ekspor biji kakao didominasi oleh Malaysia dengan pangsa nilai ekspor sebesar 90,80%, sementara pangsa nilai ekspor biji kakao ke negara-negara tujuan ekspor

lainnya sangat kecil, yaitu India (3,98%), Amerika Serikat (1,64%), Belgia (1,37%), Jepang (1,00%), dan lainnya (1,21%). Untuk pasta kakao, pangsa nilai ekspor terbesar adalah ke negara Malaysia (56,93%), diikuti Tiongkok (16,53%), Amerika Serikat (9,82%), Brazil (5,76%), Spanyol (4,98%), dan lainnya (5,97%). Sementara untuk lemak kakao, dominasi ekspor ke negara Amerika Serikat (40,85%), diikuti Belanda (9,87%), Kanada (6,62%), Estonia (5,80%), Jerman (4,88%), dan lainnya (31,98%) (IEI dan UNIED 2019). Dengan komposisi seperti itu, tampak bahwa tarikan pasar biji kakao nonfermentasi sangat kuat sehingga upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu kakao melalui fermentasi akan menghadapi tantangan yang sangat berat.

Dengan preferensi pasar seperti itu, sektor perdagangan menjadi penentu arah perlakuan petani terhadap hasil panen kakao. Apabila tujuan pasar kakao adalah untuk pangan, terutama untuk tujuan Eropa maka yang perlu dikembangkan adalah kakao fermentasi. Namun, apabila tujuan pasar kakao adalah untuk kosmetik dan obat-obatan maka yang perlu untuk dikembangkan adalah yang nonfermentasi dengan catatan keharusan untuk meningkatkan kualitas sehingga pemberlakuan penahanan otomatis (*automatic detention*) dan potongan harga (*automatic discount*) dapat dihindari. Peningkatan kualitas kakao harus dimulai dari hulu (budi daya) dan diawasi dengan baik untuk setiap tahapannya sehingga kakao Indonesia bisa berdaya saing mengingat keunggulan karakteristik kakao Indonesia.

Penerapan proses fermentasi di tingkat petani perlu diimbangi dengan dorongan terhadap industri dan pedagang agar mengapresiasi pelaksanaan fermentasi oleh petani. Kebijakan seperti ini perlu dinyatakan dalam peraturan yang setara, baik dalam bentuk Peraturan Menteri Perindustrian atau Peraturan Menteri Perdagangan. Bila perlu, penataan sistem produksi dan pemasaran biji kakao Indonesia diatur dalam peraturan/surat keputusan bersama tiga Menteri terkait kakao ini (Munarso 2016).

PENUTUP

Saat ini Indonesia menempati posisi sebagai produsen kakao terbesar kelima di dunia, turun dari posisi ketiga sebelumnya. Banyaknya masalah dan kendala yang dihadapi dalam pengembangan kakao mulai dari hulu hingga hilir telah menyebabkan produksi kakao

Indonesia terus menurun, walaupun pemerintah telah melakukan berbagai upaya dan kebijakan dengan tujuan untuk meningkatkan produksi kakao.

Perkebunan kakao yang sangat didominasi perkebunan rakyat dengan ukuran kepemilikan lahan sempit dan kemampuan modal terbatas, pengetahuan terbatas dan akses terhadap teknologi budi daya dan informasi pasar terbatas menyebabkan pentingnya peran pemerintah dalam fasilitasi upaya peningkatan produktivitas, mutu, dan akses terhadap pasar. Upaya peningkatan produksi dan produktivitas dapat dilakukan melalui berbagai upaya terutama rehabilitasi kebun, peremajaan tanaman, intensifikasi usaha tani, dan perluasan areal; peningkatan mutu dilakukan mulai dari *on farm* hingga pascapanen melalui proses penanganan pascapanen dan proses fermentasi yang baik; peningkatan akses terhadap pasar dapat dilakukan melalui penataan rantai pasok dan pengembangan industri hilirnya.

Upaya pengembangan kakao bukan hanya merupakan tanggung jawab Kementerian Pertanian, namun merupakan tanggung jawab lintas sektoral, yang juga melibatkan Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan kementerian lainnya yang memiliki tupoksi terkait dengan program pengembangan kakao pada saat ini dan di masa depan. Kementerian Pertanian berperan dalam pembinaan dan fasilitasi petani mulai dari hulu (budi daya) hingga pascapanen; Kementerian Perindustrian berperan dalam pembinaan dan fasilitasi pelaku/industri pengolahan; Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berperan dalam pembinaan dan fasilitasi kelembagaan ekonomi petani kakao dan pelaku industri pengolahan kakao skala kecil dan menengah. Kementerian-kementerian tersebut hendaknya melakukan koordinasi program-programnya sehingga saling melengkapi dan tidak tumpang tindih. Peran serta pihak pemerintah daerah, LSM, pelaku bisnis, lembaga penelitian diharapkan dapat memfasilitasi kesenjangan yang masih terjadi baik di sektor hulu, hilir, hingga pemasaran sehingga kakao akan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian masyarakat. Demikian pula, keterlibatan investor sangat diharapkan untuk mengembangkan dan membenahi agribisnis kakao sehingga posisi dan daya saing kakao Indonesia di pasar internasional dapat terus ditingkatkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dr. Saptana yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat berguna dalam penulisan makalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar I, Hakim DB, Asmarantaka RW. 2016. Struktur, perilaku dan kinerja pemasaran biji kakao di Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah. *Forum Agribis*. 6(1):1-20.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2018. Statistik kakao Indonesia 2017. Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik.
- Baihaqi A, Hamid AH, Romano, Yulianda A. 2014. Analisis rantai nilai dan nilai tambah kakao petani di Kecamatan Paya Bakong dan Geurudong Pase Kabupaten Aceh Utara. *Agrisep*. 15(2):28-35.
- Davit MJ, Yusuf RP, Yudar DAS. 2013. Pengaruh cara pengolahan kakao fermentasi dan non fermentasi terhadap kualitas, harga jual produk pada Unit Usaha Produktif (UUP) Tunjung Sari, Kabupaten Tabanan. *E-J Agribis Agrowisata*. 2(4):191-203.
- [Ditjenbun] Direktorat Jenderal Perkebunan. 2012a. Pedoman umum gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao tahun 2013. Jakarta (ID): Direktorat Jenderal Perkebunan.
- [Ditjenbun] Direktorat Jenderal Perkebunan. 2012b. Pedoman penanganan pascapanen kakao. Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/9/2012 tanggal 4 September 2012. Jakarta (ID): Direktorat Jenderal Perkebunan.
- [Ditjenbun] Direktorat Jenderal Perkebunan. 2014. Pedoman teknis budidaya kakao yang baik (*good agricultural practices/GAP on cocoa*). Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/4/2014. Jakarta (ID): Direktorat Jenderal Perkebunan.
- [Ditjenbun] Direktorat Jenderal Perkebunan. 2015. Rencana strategis Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2015-2019. Jakarta (ID): Direktorat Jenderal Perkebunan.
- [Ditjenbun] Direktorat Jenderal Perkebunan. 2016. Roadmap kakao 2015-2045. Jakarta (ID): Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar.
- Fischer E, Qaim M. 2012. Linking smallholders to markets: determinants and impacts of farmer collective action in Kenya. *J World Dev*. 40(6):1255-1268. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2011.11.018>
- Hanum SS. 2018. Faktor-faktor yang memengaruhi alih fungsi lahan kakao menjadi kelapa sawit di

- Kabupaten Asahan Sumatera Utara [Skripsi]. [Bogor (ID)]: Institut Pertanian Bogor.
- Hartartri DFS. 2015. Penanganan pascapanen dan pemasaran kakao di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. *Warta Puslitkoka*. 27(2):37-41.
- Hasibuan AM, Nurmalina R, Wahyudi A. 2012. Pengaruh pencapaian kebijakan penerapan bea ekspor dan gernas kakao terhadap kinerja industri hilir dan penerimaan petani kakao (suatu pendekatan dinamika sistem). *Bul Riset Tanam Rempah Aneka Tanam Industri*. 3(2):157-170. doi: <http://dx.doi.org/10.21082/jtidp.v3n2.2012.p157-170>
- Hastuty S. 2017. Identifikasi faktor pendorong alih fungsi lahan pertanian. *Prosiding Seminar Nasional*. 3(1):253-257.
- Haynes J, Cabbage F, Mercer E, Sills E. 2012. The search for value and meaning in the cocoa supply chain in Costa Rica. *J Sustain*. 4(7):1466-1487.
- Herman, Hutagaol MP, Sutjahjo SH, Rauf A, Priyarsono DS. 2006. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi teknologi pengendalian hama penggerek buah kakao: studi kasus di Sulawesi Barat. *Pelita Perkeb*. 22(3):222-236.
- Idris M. 2018 Agu 1. Di Kolaka Timur, Kementan bangun kawasan kakao berbasis korporasi [Internet]. [diunduh 2019 Mar 13]. Tersedia dari: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4144485/di-kolaka-timur-kementan-bangun-kawasan-kakao-berbasis-korporasi>
- Indriati G, Samsudin, Rubiyo. 2013. Keefektifan paket teknologi pengendalian penggerek buah kakao di Provinsi Bali. *Bul Riset Tanam Rempah Aneka Tanam Ind*. 4(1):65-70.
- [IEI dan UNIED] Indonesia Eximbank Institute dan University Network For Indonesia Export Development diwakili oleh Institute Pertanian Bogor. 2019. Proyeksi ekspor berdasarkan industri: komoditas unggulan. Jakarta (ID): Indonesia Eximbank.
- [ICCO] International Cocoa Organization. 2019. ICCO quarterly bulletin of cocoa statistic. Vol. XLV, No. 3, Cocoa Year 2018/2019.
- Karmawati E, Mahmud Z, Syakir M, Munarso SJ, Ardana K, Rubiyo. 2010. *Budidaya dan pascapanen kakao*. Bogor (ID): Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan. 92 hlm
- Kementerian Perindustrian. 2011 Okt 13. Pengembangan industri pengolahan kakao [Internet]. [diunduh 2019 Jan 17]. Tersedia dari: <http://www.kemenerin.go.id/artikel/427/Pengembangan-Industri-Pengolahan-Kakao>.
- Kontan.co.id. 2016 Mei 3. Kemtan menunda penerapan wajib fermentasi kakao [Internet]. [diunduh 2018 Feb 8]. Kontan.co.id: industri.kontan.co.id/news/kemtan-menunda-penerapan-wajib-fermentasi-kakao
- Listyati D, Wahyudi A, Hasibuan AM. 2014. Penguatan kelembagaan untuk peningkatan posisi tawar petani dalam sistem pemasaran kakao. *J Tanam Ind Penyegar*. 1(1):15-28.
- Managanta AA, Sumardjo, Sadono D, Tjitropranoto P. 2019. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kompetensi petani kakao di Provinsi Sulawesi Tengah. *J Penyul*. 15(1):120-133.
- Manalu R. 2018. Pengolahan biji kakao produksi perkebunan rakyat untuk meningkatkan pendapatan petani. *J Ekon Kebijak Publ*. 9(2):99-111.
- Maharani C, Siregar EB, Siregar MA. 2013. Analisis pengembangan perkebunan kakao rakyat di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. *Agrica*. 6(1):71-84.
- Mandala A. 2017 Mei 2. Pajak dan pasokan bahan baku biang keladi industri pengolahan kakao dalam negeri menciut [Internet]. *Industry.co.id*. [diunduh 2019 Feb 8]. Tersedia dari: <http://www.industry.co.id/read/7700/pajak-dan-pasokan-bahan-baku-biang-keladi-industri-pengolahan-kakao-dalam-negeri-menciut>
- Maulana A, Kartiasih F. 2017. Analisis ekspor kakao olahan Indonesia ke sembilan negara tujuan tahun 2000–2014. *J Ekon Pembang Indon*. 17(2):103-117.
- Merdeka.com. 2014 Apr 25. Ini faktor penting bisa berkembangnya industri hilir [Internet]. [diunduh 9 Jun 2019]. Tersedia dari: <https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-faktor-penting-bisa-berkembangnya-industri-hilir.html>
- Muhajir A. 2018 Okt 2. Kakao fermentasi Jembrana menembus pasar dunia. Bagian 2 [Internet]. *Mongabay:Sosial, Urban*. [diunduh 2019 Jun 22]. Tersedia dari: <https://www.mongabay.co.id/2018/10/02/kakao-fermentasi-jembrana-menembus-pasar-dunia-bagian-2/>
- Munarso SJ. 2016. Penanganan pascapanen untuk peningkatan mutu dan daya saing komoditas kakao. *J Litbang Pertan*. 35(3):111-120.
- Munarso SJ, Miskiyah, Thamrin M. 2016a. Pengaruh penanganan pascapanen terhadap mutu dan keamanan pangan biji kakao. *J Ind Hasil Perkeb*. 11(1):1-8.
- Munarso SJ, Dewandari KT, Haifa Z. 2016b. Pengaruh penambahan starter mikroba serta pemerasan pulp terhadap kondisi fermentasi dan mutu biji kakao (*Theobroma cacao* L.). *J Penelit Pascapanen Pertan*. 13(3):156-166.
- Nonci N. 2017. Implementasi program Gernas Kakao: studi kebijakan program Gernas Kakao di Kabuapten Luwu. Makassar (ID): CV Sah Media. 208 hlm.
- Nurhadi E, Hidayat SI, Indah PN, Widayanti S, Harya GI. 2019. Keberlanjutan komoditas kakao sebagai produk unggulan agroindustri dalam meningkatkan kesejahteraan petani. *Agriekon*. 8(1):51-61.

- Nurhidayah. 2014. Analisis struktur, perilaku, dan kinerja pemasaran jambu mete gelondongan di Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara [Tesis]. [Bogor (ID)]: Institut Pertanian Bogor, Program Pascasarjana.
- Permani R, Vanzetti D, Setyoko NR. 2011. Optimum level and welfare effects of export taxes for cocoa beans in Indonesia: A partial equilibrium approach. Paper presented at the 2011 AARES Annual Conference; 2011 Feb 8-11; Melbourne, Australia.
- Pratama WP. 2018 Des 12. Ekspor olahan kakao tumbuh 11% per September 2018 [Internet]. Bisnis.com: Ekonomi. [diunduh 2019 Feb 8]. Tersedia dari: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20181212/257/868938/ekspor-olahan-kakao-tumbuh-11-per-september-2018>
- Prastowo B, Mulato S, Sumanto, Efendi DS. 2012. Peningkatan mutu kakao melalui pengatusan (*depulping*) lendar biji secara mekanis. Makalah pada Seminar Peningkatan Kemampuan Peneliti dan Perekayasa. Kemenristek. Makassar.
- [Puslitkoka] Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia. tanpa tahun. Klon-klon unggul kakao lindak. Jember (ID): Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia
- Ridwan A. 2013. Morfologi buah dan tingkat serangan *Conopomorpha cramerella* Snellen (PBK) pada beberapa klon kakao. *J Agroplantae*. 2(2):93-107.
- Rubiyo R, Siswanto S. 2012. Peningkatan produksi dan pengembangan kakao (*Theobroma cacao* L.) di Indonesia. *Bul Riset Tanam Rempah Aneka Tanam Industri*. 3(1):33-48. doi: <http://dx.doi.org/10.21082/jtidp.v3n1.2012.p33-48>
- Saptana, Purwanti TB, Sunarsih, Muslim C, Supriadi H, Zakaria AK. 2018. Panel Petani Nasional (Patanas): dinamika indikator pembangunan pertanian dan perdesaan di wilayah agroekosistem lahan kering berbasis komoditas perkebunan. Laporan Penelitian. Bogor (ID): Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Setiawan HP. 2018 Nov 28. Revitalisasi data kakao [Internet]. [diunduh 2018 Mei 2]. Tersedia dari: <https://news.detik.com/kolom/d-4321119/revitalisasi-data-kakao>
- Suryana AT, Fariyanti A, Rifin A. 2014. Analisis perdagangan kakao Indonesia di pasar internasional. *J Tanam Industri Penyegar*. 1(1):29-40. doi: <http://dx.doi.org/10.21082/jtidp.v1n1.2014.p29-40>
- Syadullah M. 2012. Dampak kebijakan bea keluar terhadap ekspor dan industri pengolahan kakao. *Bul Ilm Litbang Perdag*. 6(1):53-68.
- Trebbin A. 2014. Linking small farmers to modern retail through producer organizations – Experiences with producer companies in India. *J Food Policy* 45:35-44.
- Wahyudi T, Panggabean TR, Pujiyanto. 2009. Panduan lengkap kakao, manajemen agribisnis dari hulu hingga hilir. Cet ke-2. Jakarta (ID): Penebar Swadaya.
- Wonda M, Tomayahu E. 2016. Pendapatan usahatani tanaman kakao (*Theobroma cacao*) di Kelurahan Hinekombe, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura. *Agrologia*. 5(1):30-35.
- Yusriadi M. 2015. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi konversi lahan tanaman kakao menjadi kelapa sawit di Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya [Skripsi]. [Banda Aceh (ID)]: Universitas Syiah Kuala.
- Zulfiantri, Maarif MS, Hermawan A, Hardjomidjojo H. 2017. Biaya transaksi dan benefit cost pada integrasi vertikal rantai nilai agroindustri kakao skala kecil. *J Manaj Agribis*. 14(3):187-197.
- Abubakar I, Hakim DB, Asmarantaka RW. 2016. Struktur, perilaku dan kinerja pemasaran biji kakao di Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah. *Forum Agribis*. 6(1):1-20.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2018. Statistik kakao Indonesia 2017. Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik.
- Baihaqi A, Hamid AH, Romano, Yulianda A. 2014. Analisis rantai nilai dan nilai tambah kakao petani di Kecamatan Paya Bakong dan Geurudong Pase Kabupaten Aceh Utara. *Agrisep*. 15(2):28-35.
- Davit MJ, Yusuf RP, Yudar DAS. 2013. Pengaruh cara pengolahan kakao fermentasi dan non fermentasi terhadap kualitas, harga jual produk pada Unit Usaha Produktif (UUP) Tunjung Sari, Kabupaten Tabanan. *E-J Agribis Agrowisata*. 2(4):191-203.
- [Ditjenbun] Direktorat Jenderal Perkebunan. 2012a. Pedoman umum gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao tahun 2013. Jakarta (ID): Direktorat Jenderal Perkebunan.
- [Ditjenbun] Direktorat Jenderal Perkebunan. 2012b. Pedoman penanganan pascapanen kakao. Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/9/2012 tanggal 4 September 2012. Jakarta (ID): Direktorat Jenderal Perkebunan.
- [Ditjenbun] Direktorat Jenderal Perkebunan. 2014. Pedoman teknis budidaya kakao yang baik (*good agricultural practices/GAP on cocoa*). Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/4/2014. Jakarta (ID): Direktorat Jenderal Perkebunan.
- [Ditjenbun] Direktorat Jenderal Perkebunan. 2015. Rencana strategis Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2015-2019. Jakarta (ID): Direktorat Jenderal Perkebunan.
- [Ditjenbun] Direktorat Jenderal Perkebunan. 2016. Roadmap kakao 2015-2045. Jakarta (ID): Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar.

- Fischer E, Qaim M. 2012. Linking smallholders to markets: determinants and impacts of farmer collective action in Kenya. *J World Dev.* 40(6):1255-1268. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2011.11.018>
- Hanum SS. 2018. Faktor-faktor yang memengaruhi alih fungsi lahan kakao menjadi kelapa sawit di Kabupaten Asahan Sumatera Utara [Skripsi]. [Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Hartatri DFS. 2015. Penanganan pascapanen dan pemasaran kakao di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. *Warta Puslitkoka.* 27(2):37-41.
- Hasibuan AM, Nurmalina R, Wahyudi A. 2012. Pengaruh pencapaian kebijakan penerapan bea ekspor dan gernas kakao terhadap kinerja industri hilir dan penerimaan petani kakao (suatu pendekatan dinamika sistem). *Bul Riset Tanam Rempah Aneka Tanam Industri.* 3(2):157-170. doi: <http://dx.doi.org/10.21082/jtidp.v3n2.2012.p157-170>
- Hastuty S. 2017. Identifikasi faktor pendorong alih fungsi lahan pertanian. *Prosiding Seminar Nasional.* 3(1):253-257.
- Haynes J, Cubbage F, Mercer E, Sills E. 2012. The search for value and meaning in the cocoa supply chain in Costa Rica. *J Sustain.* 4(7):1466-1487.
- Herman, Hutagaol MP, Sutjahjo SH, Rauf A, Priyarsono DS. 2006. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi teknologi pengendalian hama penggerek buah kakao: studi kasus di Sulawesi Barat. *Pelita Perkeb.* 22(3):222-236.
- Idris M. 2018 Agu 1. Di Kolaka Timur, Kementan bangun kawasan kakao berbasis korporasi [Internet]. [diunduh 2019 Mar 13]. Tersedia dari: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4144485/di-kolaka-timur-kementan-bangun-kawasan-kakao-berbasis-korporasi>
- Indriati G, Samsudin, Rubiyo. 2013. Keefektifan paket teknologi pengendalian penggerek buah kakao di Provinsi Bali. *Bul Riset Tanam Rempah Aneka Tanam Ind.* 4(1):65-70.
- [IEI dan UNIED] Indonesia Eximbank Institute dan University Network For Indonesia Export Development diwakili oleh Institute Pertanian Bogor. 2019. *Proyeksi ekspor berdasarkan industri: komoditas unggulan.* Jakarta (ID): Indonesia Eximbank.
- [ICCO] International Cocoa Organization. 2019. *ICCO quarterly bulletin of cocoa statistic.* Vol. XLV, No. 3, Cocoa Year 2018/2019.
- Karmawati E, Mahmud Z, Syakir M, Munarso SJ, Ardana K, Rubiyo. 2010. *Budidaya dan pascapanen kakao.* Bogor (ID): Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan. 92 hlm
- Kementerian Perindustrian. 2011 Okt 13. *Pengembangan industri pengolahan kakao* [Internet]. [diunduh 2019 Jan 17]. Tersedia dari: <http://www.kemenperin.go.id/artikel/427/Pengembangan-Industri-Pengolahan-Kakao>.
- Kontan.co.id. 2016 Mei 3. *Kemtan menunda penerapan wajib fermentasi kakao* [Internet]. [diunduh 2018 Feb 8]. Kontan.co.id: <https://industri.kontan.co.id/news/kemtan-menunda-penerapan-wajib-fermentasi-kakao>
- Listyati D, Wahyudi A, Hasibuan AM. 2014. Penguatan kelembagaan untuk peningkatan posisi tawar petani dalam sistem pemasaran kakao. *J Tanam Ind Penyegar.* 1(1):15-28.
- Managanta AA, Sumardjo, Sadono D, Tjitropranoto P. 2019. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kompetensi petani kakao di Provinsi Sulawesi Tengah. *J Penyul.* 15(1):120-133.
- Manalu R. 2018. Pengolahan biji kakao produksi perkebunan rakyat untuk meningkatkan pendapatan petani. *J Ekon Kebijakan Publ.* 9(2):99-111.
- Maharani C, Siregar EB, Siregar MA. 2013. Analisis pengembangan perkebunan kakao rakyat di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. *Agrica.* 6(1):71-84.
- Mandala A. 2017 Mei 2. *Pajak dan pasokan bahan baku biang keladi industri pengolahan kakao dalam negeri menciut* [Internet]. [Industry.co.id](http://www.industry.co.id/read/7700/pajak-dan-pasokan-bahan-baku-biang-keladi-industri-pengolahan-kakao-dalam-negeri-menciut). [diunduh 2019 Feb 8]. Tersedia dari: <http://www.industry.co.id/read/7700/pajak-dan-pasokan-bahan-baku-biang-keladi-industri-pengolahan-kakao-dalam-negeri-menciut>
- Maulana A, Kartiasih F. 2017. Analisis ekspor kakao olahan Indonesia ke sembilan negara tujuan tahun 2000–2014. *J Ekon Pembang Indon.* 17(2):103-117.
- Merdeka.com. 2014 Apr 25. *Ini faktor penting bisa berkembangnya industri hilir* [Internet]. [diunduh 9 Jun 2019]. Tersedia dari: <https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-faktor-penting-bisa-berkembangnya-industri-hilir.html>
- Muhajir A. 2018 Okt 2. *Kakao fermentasi Jembrana menembus pasar bunia. Bagian 2* [Internet]. *Mongabay: Sosial, Urban.* [diunduh 2019 Jun 22]. Tersedia dari: <https://www.mongabay.co.id/2018/10/02/kakao-fermentasi-jembrana-menembus-pasar-dunia-bagian-2/>
- Munarso SJ. 2016. *Penanganan pascapanen untuk peningkatan mutu dan daya saing komoditas kakao.* *J Litbang Pertan.* 35(3):111-120.
- Munarso SJ, Miskiyah, Thamrin M. 2016a. *Pengaruh penanganan pascapanen terhadap mutu dan keamanan pangan biji kakao.* *J Ind Hasil Perkeb.* 11(1):1-8.
- Munarso SJ, Dewandari KT, Haifa Z. 2016b. *Pengaruh penambahan starter mikroba serta pemerasan pulp terhadap kondisi fermentasi dan mutu biji kakao (Theobroma cacao L.).* *J Penelit Pascapanen Pertan.* 13(3):156-166.
- Nonci N. 2017. *Implementasi program Gernas Kakao: studi kebijakan program Gernas Kakao di*

- Kabupaten Luwu. Makassar (ID): CV Sah Media. 208 hlm.
- Nurhadi E, Hidayat SI, Indah PN, Widayanti S, Harya GI. 2019. Keberlanjutan komoditas kakao sebagai produk unggulan agroindustri dalam meningkatkan kesejahteraan petani. *Agriekon*. 8(1):51-61.
- Nurhidayah. 2014. Analisis struktur, perilaku, dan kinerja pemasaran jambu mete gelondongan di Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara [Tesis]. [Bogor (ID)]: Institut Pertanian Bogor, Program Pascasarjana.
- Permani R, Vanzetti D, Setyoko NR. 2011. Optimum level and welfare effects of export taxes for cocoa beans in Indonesia: A partial equilibrium approach. Paper presented at the 2011 AARES Annual Conference; 2011 Feb 8-11; Melbourne, Australia.
- Pratama WP. 2018 Des 12. Ekspor olahan kakao tumbuh 11% per September 2018 [Internet]. *Bisnis.com: Ekonomi*. [diunduh 2019 Feb 8]. Tersedia dari: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20181212/257/868938/ekspor-olahan-kakao-tumbuh-11-per-september-2018>
- Prastowo B, Mulato S, Sumanto, Efendi DS. 2012. Peningkatan mutu kakao melalui pengatusan (*depulping*) lender biji secara mekanis. Makalah pada Seminar Peningkatan Kemampuan Peneliti dan Perekayasa. Kemenristek. Makassar.
- [Puslitkoka] Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia. tanpa tahun. Klon-klon unggul kakao lindak. Jember (ID): Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia
- Ridwan A. 2013. Morfologi buah dan tingkat serangan *Conopomorpha cramerella* Snellen (PBK) pada beberapa klon kakao. *J Agropantae*. 2(2):93-107.
- Rubiyo R, Siswanto S. 2012. Peningkatan produksi dan pengembangan kakao (*Theobroma cacao* L.) di Indonesia. *Bul Riset Tanam Rempah Aneka Tanam Industri*. 3(1):33-48. doi: <http://dx.doi.org/10.21082/jtidp.v3n1.2012.p33-48>
- Saptana, Purwantini TB, Sunarsih, Muslim C, Supriadi H, Zakaria AK. 2018. Panel Petani Nasional (Patanas): dinamika indikator pembangunan pertanian dan perdesaan di wilayah agroekosistem lahan kering berbasis komoditas perkebunan. Laporan Penelitian. Bogor (ID): Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Setiawan HP. 2018 Nov 28. Revitalisasi data kakao [Internet]. [diunduh 2018 Mei 2]. Tersedia dari: <https://news.detik.com/kolom/d-4321119/revitalisasi-data-kakao>
- Suryana AT, Fariyanti A, Rifin A. 2014. Analisis perdagangan kakao Indonesia di pasar internasional. *J Tanam Industri Penyegar*. 1(1):29-40. doi: <http://dx.doi.org/10.21082/jtidp.v1n1.2014.p29-40>
- Syadullah M. 2012. Dampak kebijakan bea keluar terhadap ekspor dan industri pengolahan kakao. *Bul Ilm Litbang Perdag*. 6(1):53-68.
- Trebbin A. 2014. Linking small farmers to modern retail through producer organizations – Experiences with producer companies in India. *J Food Policy* 45:35-44.
- Wahyudi T, Panggabean TR, Pujiyanto. 2009. Panduan lengkap kakao, manajemen agribisnis dari hulu hingga hilir. Cet ke-2. Jakarta (ID): Penebar Swadaya.
- Wonda M, Tomayahu E. 2016. Pendapatan usahatani tanaman kakao (*Theobroma cacao*) di Kelurahan Hinekombe, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura. *Agrologia*. 5(1):30-35.
- Yusriadi M. 2015. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi konversi lahan tanaman kakao menjadi kelapa sawit di Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya [Skripsi]. [Banda Aceh (ID)]: Universitas Syiah Kuala.
- Zulfandi, Maarif MS, Hermawan A, Hardjomidjojo H. 2017. Biaya transaksi dan benefit cost pada integrasi vertikal rantai nilai agroindustri kakao skala kecil. *J Manaj Agribis*. 14(3):187-197.